

**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN CONGGEANG
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN CONGGEANG**

Jalan Raya Conggeang Nomor 324 Telp. (0261) -
email: kec.conggeang@gmail.com IG : KecamatanConggeang_fb : Kecamatan Conggeang
website: <https://conggeangkec.sumedangkab.go.id>
SUMEDANG



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
KECAMATAN CONGGEANG

Jalan Raya Conggeang Nomor 322 Telp. (0261) -
Email : kec.conggeang@gmail.com IG : KecamatanConggeang FB : Kecamatan Conggeang
Website : <http://conggeangkec.sumedangkab.go.id>

SUMEDANG

Kode Pos 45391

KEPUTUSAN CAMAT CONGGEANG

NOMOR : 05 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA KECAMATAN
CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 DAN DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA KERJA KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT CONGGEANG

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Palfon Anggaran Sementara dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa Pasal 125 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun dokumen rencana kerja perangkat daerah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

- dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka
27. Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
36. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
38. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor);

40. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18) ;
43. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
47. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2025;
48. Peraturan Bupati Sumedang NomorTahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2024-2026.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Sumedang Nomor....Tahun 2024 Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
 - menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
 - melakukan pengendalian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Conggeang
Pada tanggal : Juli 2024
Camer Conggeang,



SATANG SETIADI S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19660803 198603 1 005

Lampiran I : KEPUTUSAN CAMAT CONGGEANG
Nomor : 05 Tahun 2024
Tanggal : 24 Juli 2024
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA
KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 DAN
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CONGGEANG
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA
KERJA KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 DAN
DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CONGGEANG KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2024.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Ketua Tim : Camat Kecamatan Conggeang
Kabupaten Sumedang.
- B. Sekretaris Tim : Sekretaris Kecamatan Conggeang
Kabupaten Sumedang
- C. Sekretariat Tim :
1. Ketua : Kasubag Program dan Keuangan
2. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum
2. Ali Agus, SE
(Pelaksana Subbag Umum)
(Bendahara)
3. Dede Setiawan
(Pelaksana Sub Bagian Program dan
Keuangan)
4. Sri Suci Kharismawati, S.Sos
(Pelaksana Sub Bagian Program dan
Keuangan)
5. Cicik Mulyati
(Pelaksana Sub Bagian Program dan
Keuangan)
6. Asep Yanyan Taopik Hidayat, Se
(Pelaksana Sub Bagian Program dan
Keuangan)
- D. KELOMPOK KERJA I : Seksi Pemerintahan Umum
1. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Umum
2. Anggota : Dedeng Rohendi
(Pelaksana Pada Seksi Pemerintahan
Umum)
- E. KELOMPOK KERJA II : Seksi Pemerintahan Desa
1. Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Desa
2. Anggota : Haris Kusnandar, SE
(Pelaksana Pada Seksi Pemerintahan
Desa)

F. KELOMPOK KERJA III	Seksi Pelayanan Publik
1. Ketua	: Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Anggota	: Acep Momo, S.Sos (Pelaksana Pada Seksi Pelayanan Publik)
G. KELOMPOK KERJA IV	Seksi Pemberdayaan Masyarakat
1. Ketua	: Kepala Seksi Pemerintahan Umum
2. Anggota	: Suhada Sunandar (Pelaksana Seksi Pemberdayaan Masyarakat)
H. KELOMPOK KERJA V	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Ketua	: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Anggota	: 1. Cucu Hermana (Pelaksana Pada Seksi Trantibum)

II. URAIAN TUGAS

A. Ketua Tim mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024
2. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024.

B. Sekretaris Tim mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim

C. Ketua Sekretariat mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 dengan seluruh anggota Tim;
2. Mencermati Dokumen Rancangan Awal, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024;

D. Anggota Sekretariat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan persiapan perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
2. Melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. Menyusun agenda kerja tim penyusun renja Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
5. Mempedomani Surat Edaran Bupati Sumedang tentang Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
6. Memfasilitasi penyusunan dokumen rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir rencana kerja Kecamatan Conggeang Tahun 2025 dan penyusunan rancangan, rancangan akhir dokumen perubahan rencana kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024;
7. Memfasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
8. Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 kepada kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang untuk diverifikasi;
9. Menyempurnakan Dokumen Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi;
10. Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kepada Kepala Bappppeda Kabupaten Sumedang bahan penetapan untuk diajukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

E. Kelompok Kerja I Seksi Pemerintahan Umum

1. Ketua mempunyai tugas
 - a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan perumusan rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pemerintahan Umum dengan seluruh anggota Tim ;
 - b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pemerintahan Umum dengan seluruh anggota Tim;
 - c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Seksi Pemerintahan Umum dengan seluruh anggota Tim;
 - d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Pemerintahan Umum dengan seluruh anggota Tim;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan Umum kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas
 - a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja, Perangkat Daerah Tahun 2025 dan penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 lingkup Seksi Pemerintahan Umum;
 - b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 dan penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 lingkup Seksi Pemerintahan Umum;
 - c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Pemerintahan Umum;
 - d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

F. Kelompok Kerja II Seksi Pemerintahan Desa

1. Ketua mempunyai tugas
 - a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pemerintahan Desa dengan seluruh anggota Tim;
 - b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 dan penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 lingkup Seksi Pemerintahan Desa dengan seluruh anggota Tim;
 - c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Seksi Pemerintahan Desa dengan seluruh anggota Tim;
 - d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Pemerintahan Desa dengan seluruh anggota Tim;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan Desa kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah tahun 2025 dan penyusunan perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2024 lingkup Seksi Pemerintahan Desa;
- b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pemerintahan Desa;
- c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

G. Kelompok Kerja III Seksi Pelayanan Publik

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pelayanan Publik dengan seluruh anggota Tim;

- b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pelayanan Publik dengan seluruh anggota Tim;
- c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Seksi Pelayanan Publik dengan seluruh anggota Tim;
- d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Pelayanan Publik dengan seluruh anggota Tim;
- e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Pelayanan Publik;
- d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

H. Kelompok Kerja IV Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Ketua mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan seluruh anggota Tim;
- b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan seluruh anggota Tim;
- c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan seluruh anggota Tim;
- d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan seluruh anggota Tim;
- e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:

- a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

- b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).
- I. Kelompok Kerja V Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 1. Ketua mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan seluruh anggota Tim;
 - b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan seluruh anggota Tim;
 - c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2023 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan seluruh anggota Tim;
 - d. Melakukan koordinasi perumusan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan seluruh anggota Tim;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Sekretariat.
 - 2. Anggota mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Merumuskan usulan program, Kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Menyusun dan merumuskan permasalahan pembangunan Tahun 2023 lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja)..



TATIANG SETIADI S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660803 198603 1 005

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD TAHUN 2025)

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat Bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat telah dilaksanakan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sumedang/Keputusan Kepala Perangkat Daerah, **terlampir**.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

<i>Kesatu</i>	:	Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan lampiran C.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah memuat: 1) program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan; 2) lokasi kegiatan; 3) indikator kinerja; dan 4) pagu indikatif dan prakiraan maju;
<i>Kedua</i>	:	Perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan serta pagu indikatif dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 dengan prakiraan target Tahun 2026 yang diestimasikan;
<i>Ketiga</i>	:	Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Conggeang.Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

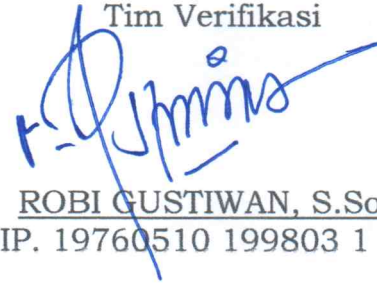
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kasubag Program dan Keuangan



YAYAT HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19700303 200701 1 013

Tim Verifikasi



ROBI GUSTIWAN, S.Sos.
NIP. 19760510 199803 1 010

Mengetahui,

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kab. Sumedang
Kepala,



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd. M.Si
NIP. 197104011997101001

Camat Conggeang



TATANG SETIADI S.Sos
NIP. 19660803 198603 1 005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi atas segala nikmat dan karunia-Nya, dengan keterbatasan kemampuan SDM maupun proses perencanaan dan penganggaran kami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dengan baik. Walaupun rencana kerja tahunan ini masih jauh dari kata sempurna dan proses rencana program maupun kegiatan dikarenakan merumuskan persoalan, penyesuaian dan mengumpulkan data dan fakta yang relevan memerlukan sinergitas dan pola perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien. Namun demikian, kesalahan-kesalahan teknis – porsedur yang mungkin terdapat dalam rencana kerja tahunan ini, semoga tidak menjadi hambatan berarti bagi pihak-pihak terkait, demi kepentingan yang luas dan subtansial, yakni peningkatan kualitas dan kuantitas Aparatur Pemerintah Kecamatan Conggeang, yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Tentu saja, bukan berarti kami hendak mengelak dari kekurangan dan kesalahan, karena justru kami sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran, yang sifatnya membangun, dari siapa pun datanya. Bukan saja untuk meniadakan kesalahan dan kesempurnaan. Namun yang lebih penting adalah sebagai motivasi keingin tahun, keluasan wawasan berfikir dan memperkokoh kearifan local kabupaten Sumedang khususnya di Kecamatan Conggeang

Akhir kata, kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi aktif turut membantu penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang ini, kami ucapkan terima kasih..

Conggeang, 2024
KECAMATAN CONGGEANG

TAIANG SETIADI S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660803 198603 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR	
ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan.....	57
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Conggeang	73
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	75
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	99
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	113
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	113
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2025.....	117
3.3. Program Kegiatan Kecamatan Conggeang Tahun 2025.....	119
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2025	198
BAB V PENUTUP.....	219

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun sampai dengan tahun 2023	37
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang.....	69
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	76
Tabel 2.4.	Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	100
Tabel 3.1.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Conggeang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Sumedang	123
Tabel 4.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Conggeang Tahun 2025.	202

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Kecamatan Conggeang).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis; dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah; pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; pendekatan politis dilaksanakan dengan penelaahan usulan pokok – pokok pikiran DPRD berupa hasil reses atas hasil penjaringan usulan Masyarakat kedalam dokumen perencanaan; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, dan kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Secara substansi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berorientasi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integrative, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Tata cara Penyusunan Rencana Perangkat Daerah berpedoman pada pasal 125 – 140 Peraturan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dimulai dengan tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan, serta dalam penyusunannya melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPPEDA dan pemangku kepentingan.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026, selanjutnya secara simultan penyusunan renja Perangkat Daerah akan dijadikan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

20. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);

29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
33. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
34. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 29);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
 41. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66).
 42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 42).
 43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 26).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan bagi Kecamatan Conggeang dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi indikator kinerja dan sasaran kegiatan Tahun 2025;
2. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju Tahun 2026;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 : Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 : Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 : Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 : Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I

2.2 : Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 : Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025, (disajikan dalam Tabel 2.3)

2.5 : Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat. (disajikan dalam Tabel 2.4

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 : Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program, Kegiatan dan sub kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dan uraian garis besar mengenai rumusan dan rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan aktivitas sub kegiatan serta pagu indikatif dengan sumber berbagai pendanaan.

BAB VI PENUTUP

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024 Triwulan II

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Conggeang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Kecamatan Conggeang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kecamatan Conggeang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Reviu didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Conggeang, dan perkiraan pelaksanaan DPA- Kecamatan Conggeang (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah) tahun berjalan yang baru disahkan. Bila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Kecamatan Conggeang belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang tahun-tahun sebelumnya sejak tahun pertama periode Renstra Kecamatan Conggeang, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Conggeang.

Kecamatan Conggeang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di kecamatan conggeang. Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu menyelenggarakan :

- a. Melenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbup;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan OPD lain yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lainnya.

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan- kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan- tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Kecamatan Conggeang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Conggeang selama tahun 2023 dan tahun berjalan 2024 serta perkiraan target anggaran Tahun 2025.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2025 sampai dengan semester I belum terlewati. Berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah **dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, sebagai berikut:**

➤ **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Sebagai Berikut:**

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 yaitu meningkatnya persentase penyelesaian laporan perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Indikator kinerja yaitu Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar RP. 66,190,000.00. dan realisasinya Rp. 60,240,000.00 atau capaian kinerja sebesar 91,01% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 5,950,000.00 target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Seringkali data yang digunakan dalam perencanaan tidak lengkap atau kurang akurat, sehingga menghambat proses pengambilan Keputusan.
- Komunikasi dan koordinasi antar bagian atau sektor seringkali kurang efektif, sehingga menghambat keselarasan dalam perencanaan
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sehingga rencana tidak mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat..
- Laporan evaluasi kinerja tidak memiliki indikator yang jelas dan terukur, sehingga sulit untuk menilai pencapaian.
- Kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

ADAPUN SOLUSI untuk menangani masalah tersebut yaitu :

- Menggunakan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang lebih akurat dan lengkap
- Membuat mekanisme koordinasi yang lebih efektif, seperti rapat rutin dan penggunaan alat komunikasi yang efisien.
- Melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah atau forum-forum diskusi untuk memastikan rencana yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka.
- Menetapkan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan realistis untuk setiap program dan kegiatan yang dilakukan.
- Memperkuat mekanisme pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk auditor internal dan eksternal.

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sasaran Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun 2023 yaitu Tersusunnya Perencanaan Perangkat Daerah dengan Indikator kinerja yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat dengan target sebesar RP. 12,950,000.00 dan realisasinya Rp. 12,950,000.00 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD
Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan target sebesar RP. 8,280,000.00 dan realisasinya Rp. 6,930,000.00 atau capaian kinerja sebesar 83,69% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1,350,000.00 target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD mungkin kurang memahami aturan dan pedoman yang berlaku
- Kurangnya koordinasi antar unit kerja dapat mengakibatkan ketidaksesuaian data dan informasi
- Jadwal yang padat dan batas waktu yang ketat sering menjadi tantangan dalam menyusun dokumen RKA-SKPD

ADAPUN SOLUSI untuk menangani masalah tersebut yaitu :

- Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman staf mengenai regulasi dan prosedur yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD
- Meningkatkan komunikasi antar unit kerja melalui rapat koordinasi rutin dan penggunaan teknologi komunikasi yang efisien
- Membuat perencanaan waktu yang baik dengan timeline yang jelas, serta memastikan semua pihak terkait mengetahui dan mematuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan.

3) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-SKPD

Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd tahun 2023 yaitu Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD dengan target sebesar RP. 5.580.000 dan realisasinya Rp. 5.580.000 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.

4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD dengan target sebesar RP. 3.490.000 dan realisasinya Rp. 3.490.000 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai..

5) Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa-Skpd tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD dengan target sebesar RP. 4.490.000 dan realisasinya Rp. 4.490.000 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.

6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2023 yaitu Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan target sebesar RP. 31.400.000 dan realisasinya Rp.26,800,000.00 atau capaian kinerja sebesar 85,35% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 4,600,000.00 target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Data yang diperlukan untuk penyusunan laporan seringkali tidak lengkap atau tidak tersedia tepat waktu, yang menghambat penyusunan laporan yang akurat.
- Kurangnya komunikasi antar tim bisa menyebabkan miskomunikasi dan penundaan dalam pengumpulan data dan informasi.
- Kurangnya tenaga kerja yang kompeten dan terlatih dalam penyusunan laporan kinerja dapat menghambat proses penyusunan laporan.

ADAPUN SOLUSI untuk menangani masalah tersebut yaitu :

- Membuat sistem pengumpulan data yang lebih efektif dan akurat, serta memastikan semua unit kerja mengumpulkan dan melaporkan data tepat waktu
- Membentuk tim koordinasi yang bertanggung jawab atas komunikasi dan koordinasi antar departemen serta menyelenggarakan pertemuan rutin untuk memastikan semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama.
- Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan staf dalam penyusunan laporan kinerja dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2023 yaitu Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target sebesar RP 2.189.877.031 dan realisasinya Rp 2,127,640,917.00 atau capaian kinerja sebesar 97,15% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 62,236,114.00 target kinerja tidak tercapai. kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan target sebesar RP. 2.176.897.031 dan realisasinya Rp. 2.114.660.917 atau sebesar 97,14% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 62,236,114.00 capaian kinerja target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Data pegawai yang tidak lengkap atau tidak diperbarui dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan gaji dan tunjangan.
- Sistem informasi yang digunakan untuk mengelola gaji dan tunjangan mungkin tidak memadai atau tidak terintegrasi dengan baik, sehingga menghambat proses administrasi.
- Kesalahan manusia dalam proses administratif, seperti kesalahan dalam input data atau perhitungan, dapat menyebabkan keterlambatan atau kesalahan pembayaran.
- Keterlambatan dalam pencairan anggaran dari pemerintah pusat atau daerah dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Melakukan pembaruan data pegawai secara rutin dan memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk perhitungan gaji dan tunjangan sudah lengkap dan akurat.
- Mengimplementasikan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen kepegawaian yang canggih dan sesuai kebutuhan untuk memastikan kelancaran proses penggajian.
- Melakukan pelatihan secara berkala untuk staf administrasi guna mengurangi kesalahan input dan perhitungan, serta menerapkan prosedur standar untuk verifikasi data.
- Bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan pencairan anggaran tepat waktu dan mengembangkan rencana kontingensi untuk mengatasi keterlambatan anggaran.

- 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Indikator kinerja Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan target sebesar RP. 3.720.000 dan realisasinya Rp. 3.720.000 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Indikator kinerja Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan target sebesar RP. 9.260.000 dan realisasinya Rp. 9.260.000 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Indikator kinerja Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah tahun 2023 yaitu Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang- undangan dengan target sebesar RP. 12.964.850 . dan realisasinya Rp. 12.964.850 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai. Kegiatan ini terdiri dari satu sub kegiatan yaitu :.
 - 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Indikator kinerja Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan target sebesar RP 12.964.850 dan realisasinya Rp. 12.964.850 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tidak tercapai. kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator kinerja Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2023 yaitu Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target sebesar RP. 7.407.400 dan realisasinya Rp. 7,400,000 atau capaian kinerja sebesar 99,90% kegiatan ini terdiri atas satu sub kegiatan yaitu :.

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Indikator kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya tahun 2023 yaitu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dengan target sebesar RP. 7.407.400 dan realisasinya Rp. 7,400,000 atau capaian kinerja sebesar 99,90% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 7,400.00 sehingga target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- Proses pengadaan yang memakan waktu lama, termasuk proses administrasi, tender, dan seleksi penyedia barang.
- Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar kualitas yang telah ditetapkan.
- Kesulitan dalam mendapatkan bahan atau pakaian yang sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditentukan.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat proses tender dengan menggunakan sistem e-procurement yang transparan dan efisien
- Menetapkan spesifikasi teknis dan standar kualitas yang jelas dan rinci, serta memastikan penyedia barang memahami dan memenuhi spesifikasi tersebut.
- Mengidentifikasi dan menjalin kerja sama dengan beberapa penyedia barang yang terpercaya dan mampu memenuhi kebutuhan pengadaan sesuai standar.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target sebesar RP. 41.037.790 dan realisasinya Rp. 38,851,540 atau capaian kinerja sebesar 94,67% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 2,186,250.00. kegiatan tersebut terdiri atas lima sub kegiatan yaitu :

1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. tahun 2023 yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan dengan target sebesar RP. 13.436.090 dan realisasinya Rp. 13,436,090 atau capaian kinerja sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tahun 2023 yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan dengan

target sebesar RP. 6.857.600 dan realisasinya Rp. . 6,857,250 atau capaian kinerja sebesar 99,99% sehingga target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- Kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi.
- Terjadi penumpukan barang di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan.
- Dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.
- Ketidakjelasan prosedur administrasi.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Membuat kontrak yang mengatur spesifikasi barang, waktu pengiriman, dan penalti jika terjadi keterlambatan atau kerusakan.
- Menugaskan tim khusus untuk mengawasi dan memastikan distribusi berjalan sesuai rencana.
- Memberikan pelatihan kepada petugas administrasi mengenai pentingnya dokumentasi yang baik dan prosedur yang benar.
- Mengimplementasikan sistem administrasi berbasis digital untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tahun 2023 yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan target sebesar RP. 12.000.000 dan realisasinya Rp. 10,000,000 atau capaian kinerja sebesar 83,33% target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- Pengadaan barang yang tidak tepat waktu.
- Kekurangan stok barang yang diperlukan.
- Distribusi barang yang tidak merata atau tidak tepat sasaran
- Pengelolaan stok yang tidak efektif.
- Kurangnya dokumentasi yang tepat dan lengkap.
- Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Merencanakan pengadaan jauh hari sebelumnya dengan jadwal yang jelas dan realistis.
- Menggunakan sistem digital untuk memantau stok barang dan melakukan pemesanan secara tepat waktu.
- Membuat rencana distribusi yang jelas dan terorganisir dengan baik.

- Menggunakan sistem manajemen inventaris yang efektif untuk memantau stok dan memastikan barang selalu tersedia sesuai kebutuhan.
- Memberikan pelatihan kepada staf mengenai pentingnya dokumentasi yang baik dan prosedur administrasi yang benar.
- Mengadakan rapat koordinasi rutin untuk membahas kebutuhan logistik dan mengatasi masalah yang muncul.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tahun 2023 yaitu Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan dengan target sebesar RP. 5.960.100 dan realisasinya Rp. 5,942,200 atau capaian kinerja sebesar 99,69% target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- Peralatan cetak dan penggandaan yang sering mengalami kerusakan.
- Dokumentasi proses cetak dan penggandaan yang tidak lengkap atau tidak akurat.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Melakukan pemeliharaan rutin dan perawatan peralatan untuk mencegah kerusakan.
- Memberikan pelatihan kepada staf mengenai pentingnya dokumentasi yang baik dan prosedur administrasi yang benar.

5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dengan target sebesar RP. 2.784.000 dan realisasinya Rp. 2,616,000 atau capaian kinerja sebesar 93,96% target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- Kualitas bahan bacaan yang buruk.
- Kesulitan dalam memperoleh bahan bacaan terbaru atau peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama jika tidak ada penyedia lokal atau akses internet yang terbatas.
- Penyimpanan bahan bacaan dan peraturan yang tidak memadai.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Memilih bahan bacaan dan peraturan dari sumber yang terpercaya dan memiliki reputasi baik.
- Menjalin kerja sama dengan penyedia bahan bacaan dan sumber hukum untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas, serta memanfaatkan sumber online yang dapat diakses dengan lebih mudah.
- Menyediakan fasilitas penyimpanan yang aman dan terorganisir untuk bahan bacaan dan peraturan.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator kinerja Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target sebesar RP. 34.658.120 dan realisasinya Rp. 33,730,000 atau capaian kinerja sebesar 97,32% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 928.120 target kinerja tidak tercapai Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.

1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya tahun 2023 yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan dengan target sebesar RP. 34.658.120 dan realisasinya Rp. 33,730,000 atau capaian kinerja sebesar 97,32% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 928.120 target kinerja tidak tercapai

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Peralatan atau mesin cepat rusak karena kurangnya pemeliharaan dan perawatan.
- Kesulitan dalam menemukan penyedia yang dapat menawarkan peralatan dan mesin dengan spesifikasi yang sesuai serta harga yang wajar.
- Risiko mendapatkan peralatan dan mesin yang tidak sesuai dengan standar kualitas atau spesifikasi yang dibutuhkan.
- Biaya perbaikan yang tinggi karena kerusakan yang tidak terdeteksi sejak dini.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Membuat jadwal pemeliharaan dan perawatan rutin untuk memastikan peralatan atau mesin selalu dalam kondisi baik.

- Bekerja sama dengan penyedia yang memiliki reputasi baik dalam menyediakan peralatan dan mesin dengan kualitas yang sesuai dan harga yang wajar.
- Menyusun spesifikasi teknis dan standar kualitas yang jelas untuk peralatan dan mesin yang dibutuhkan, serta melakukan evaluasi menyeluruh sebelum melakukan pembelian.
- Menggunakan sistem pemantauan untuk mendeteksi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan segera serta memberikan pelatihan kepada staf mengenai cara merawat dan memperbaiki peralatan atau mesin.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar RP. 276.181.844 dan realisasinya Rp. 275,830,738 atau capaian kinerja sebesar 99,87% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 351.106 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target sebesar RP. 28.931.844 dan realisasinya Rp. 28,580,738 atau capaian kinerja sebesar 98,78% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 351.106 target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Pasokan listrik yang tidak stabil atau sering terjadi pemadaman..
- Keterlambatan dalam penyediaan jasa atau keterbatasan penyedia layanan di daerah dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan.
- Kendala teknis dan masalah pemeliharaan yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan gangguan dalam layanan komunikasi, air, dan listrik.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Meningkatkan dan merawat infrastruktur listrik termasuk jaringan distribusi dan pembangkit listrik.
- Bekerja sama dengan penyedia jasa yang memiliki reputasi baik dan dapat diandalkan dalam hal kualitas dan kecepatan layanan

- Mengimplementasikan rencana pemeliharaan yang terjadwal dan sistematis untuk mengatasi masalah teknis dan mencegah gangguan layanan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target sebesar RP. 247.250.000 dan realisasinya Rp. 247.250.000 atau capaian kinerja sebesar 100.% target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target sebesar RP. 167.250.000 dan realisasinya Rp. 166,843,500. atau capaian kinerja sebesar 99,75% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 406.500 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kegiatan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator kinerja Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun 2022 yaitu Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dengan target sebesar RP. 65.800.000 dan realisasinya Rp. 65,574,500 atau capaian kinerja sebesar 99,65% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 225.500 target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu .

- Prosedur administrasi untuk pemeliharaan, pembayaran pajak, dan perizinan sering kali kompleks dan memakan waktu.
- Keterlambatan dalam proses pembayaran pajak atau perizinan dapat mengakibatkan denda atau masalah hukum.
- Keterbatasan penyedia jasa pemeliharaan yang berkualitas atau kesulitan dalam mendapatkan layanan yang sesuai dapat mempengaruhi kondisi kendaraan.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Mengkaji dan menyederhanakan prosedur administratif untuk mempermudah proses pemeliharaan, pembayaran pajak, dan perizinan kendaraan. Memanfaatkan teknologi untuk mengurangi beban administrasi.
- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara bagian yang mengelola kendaraan dinas dengan bagian keuangan atau administrasi untuk memastikan semua aspek terkait pemeliharaan dan perizinan terkelola dengan baik.
- Bekerja sama dengan penyedia jasa pemeliharaan yang memiliki reputasi baik dan dapat diandalkan untuk memastikan kendaraan dinas dalam kondisi baik.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Indikator kinerja Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya tahun 2023 yaitu Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan target sebesar Rp. 4.680.000 dan realisasinya Rp. 4.680.000 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tahun 2023 yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi dengan target sebesar Rp. 96.770.000 dan realisasinya Rp. 96,589,000 atau capaian kinerja sebesar 99,81% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 181.000 target kinerja tidak tercapai.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Keterlambatan dalam proses tender, pengadaan material, atau pengerjaan oleh kontraktor dapat mengganggu jadwal pemeliharaan.
- Kekurangan tenaga ahli atau staf yang terampil dalam bidang konstruksi dan pemeliharaan dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan.
- Kerusakan yang sudah parah pada bangunan dapat memerlukan rehabilitasi yang lebih intensif dan mahal.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Membuat perencanaan yang matang dengan jadwal yang realistis dan jelas untuk seluruh tahap pemeliharaan dan rehabilitasi.
- Melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang berpengalaman dalam bidang konstruksi dan pemeliharaan untuk memastikan kualitas pekerjaan.
- Melakukan penilaian kondisi bangunan secara berkala untuk mengidentifikasi kerusakan sejak dini dan mencegah kerusakan yang lebih parah.

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.

Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yaitu Tercapainya Efektifitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Lapora Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan target sebesar RP 45,000,000.00 dan realisasinya Rp. 37,450,000.00 atau capaian kinerja sebesar 83,22%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kurangnya koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbagai pihak.

SOLUSI rekomendasinya adalah sering melaksanakan pertemuan dengan berbagai pihak dari desa maupun dari UPTD baik secara internal maupun external permasalahan permasalahan yang ada dapat terkomunikasikan

1) Sub Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait
Indikator kinerja Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait tahun 2022 yaitu Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan target sebesar RP. 20.600.000,00 dan realisasinya Rp. 20.600.000,00 atau capaian kinerja sebesar 100% target kinerja tercapai.

2) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sasaran Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yaitu Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

dengan target sebesar RP. 45,000,000.00 dan realisasinya Rp. 37,450,000.00 atau capaian kinerja sebesar 83,22%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kurangnya koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan antar perangkat daerah dengan instansi terkait.

SOLUSI rekomendasinya adalah sering melaksanakan pertemuan dengan berbagai pihak dari desa maupun dari UPTD baik secara internal maupun external permasalahan permasalahan yang ada dapat terkomunikasikan

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sasaran Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yaitu Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Lapora Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target sebesar RP. 75,000,000.00 dan realisasinya Rp. 75,000,000.00 atau capaian kinerja sebesar 100%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu. Kurang optimalnya pelaksanaan Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

SOLUSI rekomendasinya adalah program tersebut harus lebih ditingkatkan lagi atau di fokuskan pada segi pelayanannya dengan cara melakukan monev internal petugas khusus pelayanan secara berkala serta melakukan improvisasi dalam mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana serta didukung dengan aktifitas kegiatan yang menunjang atau yang sinkron dengan program tersebut

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha yaitu Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Indikator kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan dengan target sebesar RP. 75,000,000.00 dan realisasinya Rp. 75,000,000.00 atau capaian kinerja sebesar 100%

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu. Kurang optimalnya pelaksanaan pelayanan Non Perijinan Usaha.

SOLUSI rekomendasinya adalah program tersebut harus lebih ditingkatkan lagi atau di fokuskan pada segi pelayanannya dengan cara melakukan monev internal petugas khusus pelayanan secara berkala serta melakukan improvisasi dalam mensiasati keterbatasan sarana dan prasarana serta

didukung dengan aktifitas kegiatan yang menunjang atau yang sinkron dengan program tersebut.

III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sasaran Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yaitu Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Lapora Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan target sebesar RP. 44,500,000.00 dan realisasinya Rp. 36,676,300.00 atau capaian kinerja sebesar 82,41%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, sehingga program tidak sesuai dengan kebutuhan lokal
- Tidak adanya kerjasama yang baik antara instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta di tingkat kecamatan.
- Program tidak berjalan sesuai rencana karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta Melaksanakan sosialisasi secara intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat
- Membentuk tim koordinasi antar instansi dengan peran dan tanggung jawab yang jelas serta mengadakan rapat koordinasi secara berkala untuk membahas perkembangan dan tantangan yang dihadapi.
- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas dengan indikator kinerja yang terukur serta Mengadakan evaluasi secara berkala dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sasaran Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yaitu Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target sebesar

RP44,500,000.00 dan realisasinya Rp. 36,676,300.00 atau capaian kinerja sebesar 82,41%

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :

- Musrenbang sering didominasi oleh kelompok atau individu tertentu, sehingga aspirasi kelompok lain tidak tersampaikan dengan baik.
- Lembaga kemasyarakatan sering tidak memiliki kapasitas yang memadai dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyusun usulan yang tepat.
- Usulan yang disampaikan dalam Musrenbang sering tidak ditindaklanjuti dengan baik, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat.
- Waktu yang disediakan untuk Musrenbang seringkali tidak cukup untuk membahas semua isu yang ada secara mendalam.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Menetapkan aturan yang memastikan distribusi waktu bicara yang adil bagi setiap peserta serta membentuk kelompok kerja atau komite yang terdiri dari berbagai perwakilan masyarakat untuk menjamin keterwakilan yang merata.
- Mengadakan pelatihan bagi anggota lembaga kemasyarakatan tentang teknik pengumpulan data, analisis kebutuhan, dan penyusunan usulan program serta memanfaatkan bantuan teknis dari pihak eksternal seperti LSM atau perguruan tinggi.
- Membuat mekanisme tindak lanjut yang jelas dan transparan, termasuk pengawasan dan pelaporan kemajuan serta Membentuk tim monitoring yang melibatkan perwakilan masyarakat untuk memantau pelaksanaan hasil Musrenbang.
- Menyediakan sesi tambahan atau pertemuan lanjutan untuk membahas isu-isu yang belum terselesaikan serta mengoptimalkan waktu yang ada dengan struktur agenda yang jelas dan efisien.

2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Sasaran Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yaitu Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan target sebesar RP. 368,050,000.00 dan realisasinya Rp. 355,850,000.00 atau capaian kinerja sebesar 96,68%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- Tidak optimalnya penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

- Kurangnya koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dan dengan pemerintah kecamatan sering mengakibatkan duplikasi program dan tidak efektifnya penggunaan sumber daya.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan karena kurangnya kesadaran atau ketidakpercayaan terhadap lembaga kemasyarakatan.
- Tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai menyebabkan sulitnya mengukur keberhasilan dan dampak program.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- peran serta lembaga kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan selalu di ikut sertakan dalam berbagai kegiatan yang menunjang kegiatan tersebut serta berkolaborasi dengan dinas atau instansi terkait dan penguatan sinergi secara anggaran untuk menciptakan program dan kegiatan berkelanjutan dalam Upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
- Membentuk forum komunikasi dan koordinasi rutin antara lembaga kemasyarakatan dan pihak pemerintah Kecamatan serta membangun jejaring kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki visi dan misi serupa untuk sinergi program.
- Melakukan sosialisasi dan kampanye yang lebih intensif tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan serta Menggunakan pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program untuk melibatkan masyarakat secara langsung.
- Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang jelas dengan indikator kinerja yang terukur serta Mengadakan evaluasi berkala dan melibatkan masyarakat dalam proses penilaian untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

Sasaran Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan yaitu Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dengan target sebesar RP. 368,050,000.00 dan realisasinya Rp. 355,850,000.00 atau capaian kinerja sebesar 96,68% .

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- Tidak optimalnya penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.
- Banyak lembaga kemasyarakatan yang terlibat sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, menyebabkan tumpang tindih kegiatan dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

- Beberapa lembaga kemasyarakatan mungkin kurang berpartisipasi aktif atau tidak terlibat secara penuh dalam kegiatan yang diselenggarakan.
- Tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi yang memadai untuk menilai keberhasilan dan dampak dari kegiatan yang diselenggarakan.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- peran serta lembaga kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan selalu diikutsertakan dalam berbagai kegiatan yang menunjang kegiatan tersebut serta berkolaborasi dengan dinas atau instansi terkait dan penguatan sinergi secara anggaran untuk menciptakan program dan kegiatan berkelanjutan dalam Upaya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan.
- Membentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan setiap lembaga kemasyarakatan untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan komunikasi yang efektif dan menyelaraskan tujuan serta kegiatan setiap lembaga.
- Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi untuk membangun kesadaran tentang pentingnya partisipasi aktif setiap Lembaga serta menyediakan insentif atau pengakuan untuk mendorong keterlibatan yang lebih besar dari setiap lembaga.
- Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja yang terukur dan relevan serta melibatkan pihak ketiga independen untuk melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik yang obyektif.

IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sasaran Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu Terlaksannya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Lapora Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar RP. 6,200,000.00 dan realisasinya Rp. 5,650,000.00 atau capaian kinerja sebesar 91,12%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu

- Tidak adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, seperti aparat kecamatan, polisi, dan masyarakat..
- Personel yang kurang terlatih dan tidak memiliki kemampuan yang memadai.

- Kurangnya resistensi dari Masyarakat atau masyarakat tidak mendukung atau bahkan menolak upaya yang dilakukan.
- Tidak adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan program.

SOLUSI rekomendasinya adalah

- Meningkatkan frekuensi rapat koordinasi antar pihak terkait dan membentuk forum komunikasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan..
- Mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam menjaga ketertiban dan ketentraman
- Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi personel keamanan dan ketertiban, serta mengundang narasumber berpengalaman untuk memberikan materi pelatihan.
- Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya ketentraman dan ketertiban, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan.
- Membentuk tim pengawas independen yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memberikan masukan untuk perbaikan.

1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan
 Sasaran Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan yaitu Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target sebesar RP. 6,200,000.00 dan realisasinya Rp. 5,650,000.00 atau capaian kinerja sebesar 91,13% .

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam penanggulangan bencana terutama petugas penanggulangan bencana.

SOLUSI rekomendasinya adalah melakukan pelatihan kepada aparat Desa khususnya linmas dan sering mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang budaya gotong royong, dan nilai-nilai patriotism serta pengajuan anggaran untuk kegiatan tersebut.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yaitu Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target sebesar Rp. 23,100,000.00 dan realisasinya Rp. 21,750,000.00 atau capaian kinerja sebesar 94.16%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang disebabkan oleh masih lemahnya evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah Kecamatan.

SOLUSI rekomendasinya adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah Kecamatan yang dilakukan setiap minggu yaitu dalam rapat minggon dan memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur forkopimkec dalam pelaksanaan pemerintahan Pembangunan dan upaya dalam penyelesaian masalah-masalah aktual di wilayah Kecamatan Conggeang.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yaitu Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target sebesar Rp. 23,100,000.00 dan realisasinya Rp. 21,750,000.00 atau capaian kinerja sebesar 94.16%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kurangnya koordinasi antar pimpinan skateholder perangkat daerah dalam penyelesaian masalah serta belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang disebabkan oleh masih lemahnya evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah Kecamatan.

SOLUSI rekomendasinya adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah Kecamatan yang dilakukan setiap minggu yaitu dalam rapat minggon dan memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur forkopimkec dalam pelaksanaan pemerintahan Pembangunan dan upaya dalam penyelesaian masalah-masalah aktual di wilayah Kecamatan Conggeang...

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yaitu Terlaksannya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target

sebesar Rp 25,000,000.00 dan realisasinya Rp. 14,250,000.00 atau capaian kinerja sebesar 57%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Kurangnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa.

SOLUSI rekomendasinya adalah meningkatkan peran aktif Desa dalam Standar Pelayanan Minimal dengan cara mensosialisasikan atau memberikan pelatihan kepada aparatur Desa.

1) Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sasaran Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa yaitu Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan Indikator kinerja pada tahun 2023 yaitu Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina dengan target sebesar RP. 25,000,000.00 dan realisasinya Rp. 14,250,000.00 atau capaian kinerja sebesar 57%.

KENDALA yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Masih kurangnya pemahaman aparatur desa dalam menyusun dan pelaporan administrasi tata pemerintah desa.

SOLUSI rekomendasinya adalah meningkatkan peran aktif Desa dalam Standar Pelayanan Minimal dengan cara mensosialisasikan atau memberikan pelatihan kepada aparatur Desa

➤ **Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sampai Triwulan II Sebagai Berikut:**

I. PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan dengan target sebesar RP. 7,500,000.00 dan realisasinya Rp 2,400,000.00 atau capaian kinerja sebesar 32% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5,100,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan target sebesar RPRp 2,400,000.00 atau capaian kinerja sebesar 32% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 5,100,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

2. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah

Yang ada di Kecamatan dengan target sebesar RP. 15,000,000.00 dan realisasinya Rp. 0,00 atau capaian kinerja sebesar 0,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 15,000,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan target sebesar RP. 15,000,000.00 dan realisasinya Rp. 0,00 atau capaian kinerja sebesar 0,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 15,000,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan target sebesar RP. 73,640,100.00 dan realisasinya Rp. 36,951,700.00 atau capaian kinerja sebesar 50,17% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 36,688,400.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya.

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Indikator kinerja sub Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan dengan target sebesar RP. 73,640,100.00 dan realisasinya Rp. 36,951,700.00 atau capaian kinerja sebesar 50,17% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 36,688,400.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya.

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Indikator kinerja Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan target sebesar RP. 421,500,000.00 dan realisasinya Rp. 180,774,700.00 atau capaian kinerja sebesar 42,88% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 240,725,300.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

- 1) Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
Indikator kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan tahun 2023 Triwulan II yaitu Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan dengan target sebesar RP. 421,500,000.00 dan realisasinya Rp. 180,774,700.00 atau capaian kinerja sebesar 42,88% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 240,725,300.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

III. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target sebesar RP. 10,000,000.00 dan realisasinya Rp. 7,746,000.00 atau capaian kinerja sebesar 77,46% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2,254,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan target sebesar RP. 10,000,000.00 dan realisasinya Rp. 7,746,000.00 atau capaian kinerja sebesar 77,46% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 2,254,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target sebesar RP. 100,000,000.00 dan realisasinya Rp. 31,000,000.00 atau capaian kinerja sebesar 31 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 69,000,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan target sebesar RP. 75,000,000.00 dan realisasinya Rp. 23,100,000.00 atau capaian kinerja sebesar 30,8 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 51,900,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Indikator kinerja Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target sebesar RP. 25,000,000.00 dan realisasinya Rp 7,900,000.00 atau capaian kinerja sebesar 31,6 % sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 17,100,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya.

V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa dengan target sebesar RP. 5,000,000.00 dan realisasinya Rp. 3,550,000.00 atau capaian kinerja sebesar 71,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1,450,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

1) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Indikator kinerja Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya tahun 2024 Triwulan II yaitu Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan target sebesar RP. 5,000,000.00 dan realisasinya Rp. 3,550,000.00 atau capaian kinerja sebesar 71,00% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1,450,000.00 target kinerja tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu karena kegiatan tersebut akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya

Secara lengkap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN CONGGEANG
SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

PD : KECAMATAN CONGGEANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan				
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12				
URUSAN PILIHAN 2021															
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
7	01	02	2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	-	4 laporan	100%		
7	01	02	2.	01	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait	Jumlah Daftar Usulan Kegiatan	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	4 dokumen	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.02.02.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	-	6 kali	4 lembaga	4 lembaga	100%	-	8 Lembaga	8	
7.01.02.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada dikecamatan	Persentase SPPT yang disampaikan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	100%	100	
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase SPPT yang disampaikan	1 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	1 laporan	25 laporan	100%	
7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan	1 laporan	12 jenis	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	14 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.02.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan	1 dokumen	12 jenis	12 jenis	12 jenis pelayanan	100%	1 dokumen	25 jenis	100%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	5 laporan	100%	
7.01.03.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana Yang Dilatih; Cakupan penanganan pencegahan penyebaran Covid-19		60 orang	60 orang	60 orang	100%	-	120 orang	100%	
7.01.03.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Meningkatnya wawasan masyarakat	1 laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	8 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
70103201	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Wakil Peserta TQ untuk tingkat TQ yang lebih tinggi; Jumlah Hari-Hari Besar Yang Diperingati; Jumlah Keluarga Yang Diberdayakan	4 laporan	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia	100%	4 laporan	40 orang, 4 kali, 96 orang dan 40 lansia	100%	
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Tramtibus yang Ditangani dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Pencegahan Covid-19 di Tingkat Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%	
70104201	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Laporan Pencegahan Covid-19 ditingkat Kecamatan	12 laporan	6 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	30 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
701052.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Sinergisnya pembangunan	1 lapoaran	1 lapoaran	1 lapoaran	1 lapoaran	100%	1 lapoaran	3 laporan	100%	
701052.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Permasalahan Yang Diselesaikan	1 dokumen	100%	100%	100%	100	1 dokumen	100%	100%	
70106	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Administrasi Desa; Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
701062.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Meningkatnya kompetensi aparatur pemerintah desa dan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	3 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
70106202	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Yang Dibina; Jumlah Pengelola BUMDes Yang Dibina	0	1 dokumen	1	1	1	1 dokumen	3 dokumen	100%	
70106203	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang Terevaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70106209	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen Rencana Pembangunan Desa Yang Sesuai Dengan Peraturan	-	-	-	-	-	-	-	-	
URUSAN PILIHAN 2022- 2023											
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	2 dokumen	2 laporan	2 laporan	100%	-	4 dokumen	100%	
7.01.02.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	4 dokumen	100%	
7.01.02.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	6 kali	4 lembaga	4 lembaga	100%	-	4 lembaga	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	100%	
7 01 02 2.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%	1 laporan	13 laporan	100%	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 laporan	12 jenis	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.02.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkaitan Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	12 jenis	12 jenis pelayanan	12 jenis pelayanan	100%	1 dokumen	24 jenis	100%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.03.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	100%	
7.01.03.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	4 Lembaga	-	-	-	-	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.03.2.03.0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	60 orang	60 orang	60 orang	100%	-	120 orang	100%	
7.01.03.2.03.3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	7 laporan	100%	
7.01.03.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 laporan	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia	100%	4 laporan	4 laporan	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.03.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	-	60 orang, 12 kelompok, 24 tim	60 orang, 12 kelompok, 24 tim	100%	-	60 orang, 12 kelompok, 24 tim	100	
7.01.03.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	-	12 kelompok, 60 orang	12 kelompok, 60 orang	100%	-	12 kelompok, 60 orang	100	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Masalah Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%	
7.01.04.2.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	6 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	18 laporan	100%	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Suku Agama Ras dan Antar Golongan yang Ditangani dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 lapoaran	1 lapoaran	1 lapoaran	1 lapoaran	100%	1 lapoaran	3 laporan	100%	
7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	1 dokumen	1 dokumen	100	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.06.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 dokumen	-	60 orang	60 orang	100%	1 dokumen	1 dokumen	100	
7.01.06.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	-	3 dokumen	100%	
Urusan Pilihan 2024-2026											
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	2 dokumen	-	-	100%	1 laporan	3 laporan	100%	
7.01.02.01	Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	12 laporan	2 dokumen	-	-	100%	12 laporan	14 dokumen	100%	
7.01.02.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	4 lembaga	-	-	100%	-	4 Lembaga	100%	
7.01.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada dikecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%	
7.01.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 laporan	12 jenis	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%	
7.01.02.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 dokumen	12 jenis	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	100%	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	83.33%	100%	100%	100%	100%	83.33%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	-	2 laporan	100%	
7.01.03.2.01.3	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	60 orang	60 orang	60 orang	100%	-	120 orang	100%	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1 laporan	4 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	8 laporan	100%	
7.01.03.2.03.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 lembaga	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20 lansia	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20	20 orang, 2 kali, 48 orang dan 20	100%	4 laporan	40 orang, 4 kali, 96 orang dan 40 lansia	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%	
701042010	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	30 laporan	100%	
70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.05.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2 lapoaran	1 lapoaran	1 lapoaran	1 lapoaran	100%	1 lapoaran	3 laporan	100%	
7.01.05.2.01.6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	
7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	100%	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik	66.67%	100%	100%	1005	100%	66.67%	100	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2024 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program /Kegiatan Renstra s/d Tahun Berjalan		Catatan
					Target Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024 n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
7.01.06.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%	
7.01.06.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		-	2 dokumen	100%	
7.01.06.01.7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Conggeang

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, maka tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai berikut.

1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya.

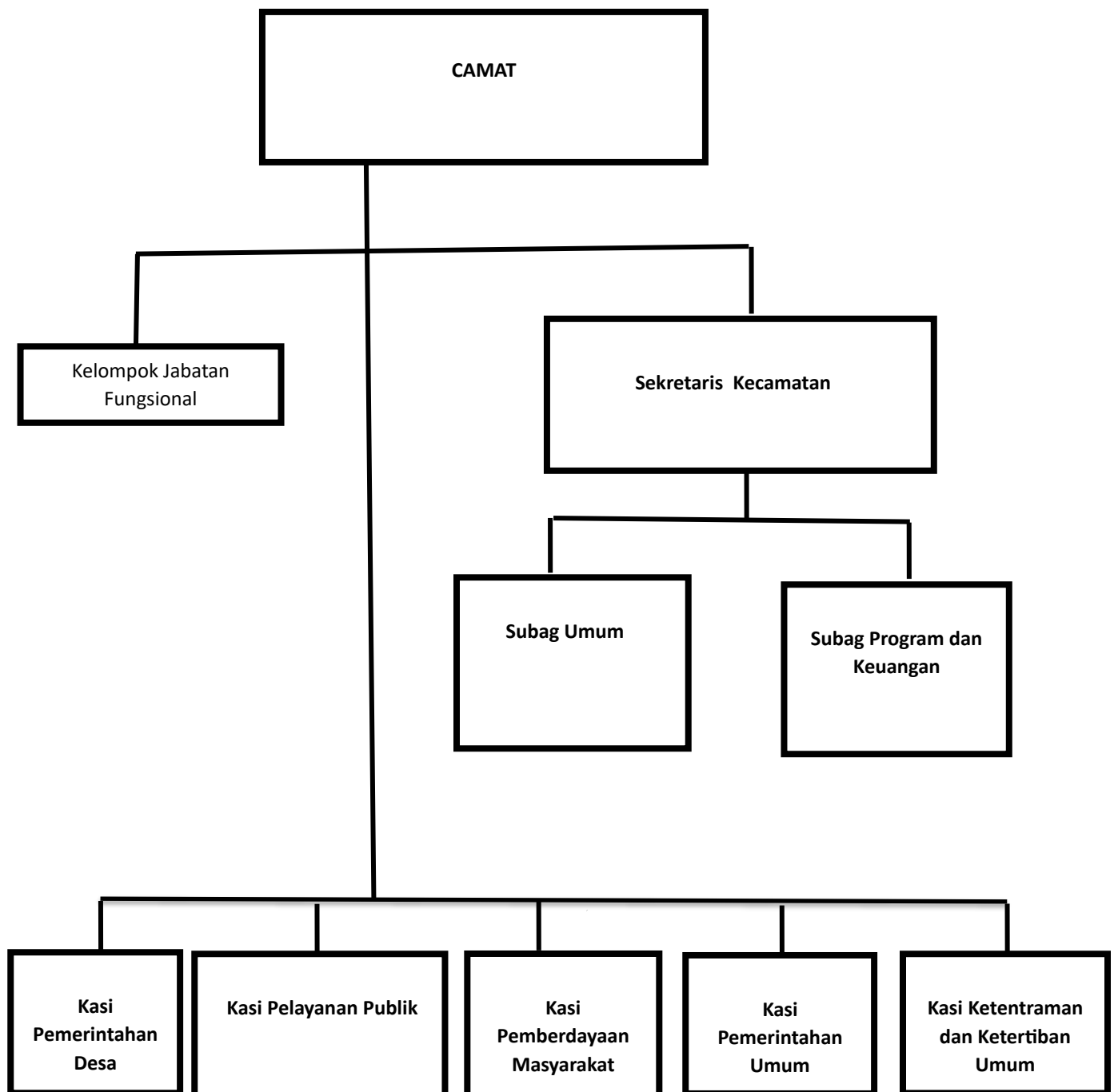
3. Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang

Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - 2.1 Subag Umum;
 - 2.2 Subag Program dan Keuangan;
3. Kasi Pemerintahan Desa;
4. Kasi Pelayanan Publik;
5. Kasi Pemerintahan Desa;
6. Kasi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan sebagaimana Gambar berikut:

Struktur Organisasi Kecamatan Conggeang



1. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Kabupaten Sumedang, uraian tugas Camat, Sekretaris Kecamatan, Para Kasubag dan Para Kepala Seksi di Kecamatan adalah sebagai berikut:

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS CAMAT**

- Tugas Pokok Camat
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat Kecamatan;
 2. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perbub;
 5. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 6. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan OPD lain yang ada di Kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Uraian Tugas Camat
 1. Merumuskan dan menetapkan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
 2. Mengordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan Kecamatan;
 3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
 4. Merumuskan dan mengendalikan kebijakan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kehumasan dan protokol pengelolaan barang milik daerah;

5. Merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Kecamatan;
6. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
7. Menyenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
8. Menyenggarakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
9. Menyenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Menyenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitasi pelayanan umum;
11. Menyenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
12. Menyenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
13. Menyenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
14. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Kecamatan; dan
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIS KECAMATAN**

1. Menyenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja Kecamatan;
2. Menyenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Kecamatan;
3. Menyenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas lingkup sekretariat dan Kecamatan;
4. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;

5. Mengoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas unit kerja/seksi pada Kecamatan;
6. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
7. Merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggaan dan kebutuhan sarana dan prasarana kerja kecamatan;
8. Menyenggarakan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Kecamatan;
9. Menyenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan;
10. Merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
11. Menyenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
12. Merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kecamatan;
13. Merumuskan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
14. Menyenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Kecamatan;
15. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan bidang program kerja, pelaporan, administrasi keuangan dan pembendaharaan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan adalah sebagai berikut;

1. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkup Kecamatan;
2. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja di lingkup subbagian program dan keuangan;
3. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang penyusunan program dan keuangan;
4. Menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kecamatan;

5. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan dengan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;
6. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
7. Menyusun dan mengkoordinasikan laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;
8. Menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan Kecamatan;
9. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
10. Menyusun bahan dan melaksanakan pelaporan keuangan;
11. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;
12. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program dan keuangan; dan
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM**

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kepala Sub Bagian Umum Aset adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol, barang milik daerah dan kepegawaian Kecamatan;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang umum;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja, instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang umum;
4. Melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Kecamatan;
5. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Kecamatan;
6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Kecamatan;

7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan;
8. Menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kecamatan;
9. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum; dan
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMERINTAHAN DESA**

Kasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan tata pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang pemerintahan desa;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan desa;
4. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
6. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
7. Melaksanakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
8. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Desa;
9. Menyusun bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;

10. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa dan atau Kelurahan;
11. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan partisipatif diwilayah Desa;
12. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama Desa dengan pihak lainnya;
13. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan penegasan batas Desa;
14. Melaksanakan koordinasi pendampingan Desa;
15. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang pemerintahan desa;
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PELAYANAN PUBLIK**

Mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang pelayanan publik;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pelayanan publik;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pelayanan publik;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dengan instansi dan atau pihak terkait;
5. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat;
6. Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi pertanahan;
8. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

9. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
10. Melaksanakan koordinasi dan sinergi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik;
11. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkup Kecamatan;
12. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat;
13. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pelayanan publik;
14. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMERINTAHAN UMUM**

Kepala Kasi Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang pemerintahan umum;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa dan ketahanan nasional;
5. Melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya diwilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan penanganan konflik sosial diwilayah Kecamatan;
7. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila di wilayah Kecamatan;
8. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
9. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
10. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di wilayah Kecamatan;

11. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang pemberdayaan masyarakat;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan atau kelurahan;
5. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan;
7. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana serta pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
8. Merumuskan bahan rencana pengembangan dan pembangunan usaha ekonomi masyarakat;
9. Melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
10. Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
11. Melaksanakan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkup kecamatan dan atau kelurahan;
12. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat;
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

➤ **TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Kasi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang Trantibum;
2. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang trantibum;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian, TNI, instansi dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan unsur lainnya dalam upaya harmonisasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
6. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
7. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penanggulangan dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban;
8. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kebencanaan di wilayah Kecamatan;
9. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemerintahan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Conggeang Tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Conggeang Tahun 2018-2023.

Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah dan kualitas kinerja pemerintahan akan selalu menjadi penilaian dan sorotan dari pemerintah dan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan menjadi harapan dan keinginan masyarakat dengan mudah, sederhana, biaya murah dan tepat waktu.

Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan sistem pelayanan di kecamatan yang dapat memuaskan masyarakat. Kualitas pelayanan publik dan kualitas kinerja pemerintah ini dapat menjadi indikator kinerja kecamatan.

Analisa kinerja pelayanan Kecamatan Conggeang didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CONGGEANG

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13
I	Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)													
A	Aspek Pelayanan Umum													
1	Fokus Layanan Urusan Wajib : Otonomi Daerah													
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada atau tidaknya
	Perencanaan kinerja 2019-2021													
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada / tidak	Ada	Ada	Ada	Ada		Ada	Ada		Ada	Ada	
II	Indikator Kinerja Lainnya													
A	Indikator Kinerja Program RPJMD 2018-2023													
1	Non urusan													
	Nilai Sakip Perangkat Daerah			B	BB	A	A	A	-	CC	B	A	A	
	Tingkat Penyerapan Anggaran			98%	98%	98%	98%	98%	98,12%	95,68	94,02%,			
	Jumlah Inovasi Kecamatan			1	2	3	4	5	1	2	2	-	-	
	Indeks Pembangunan Zona Integritas			65	70	75	80	85	70,42	75	85	-	-	

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13
2	Urusan													
	Indeks Kepuasan Masyarakat			82,81	84,61	86,4	88,2	90	81,91	83,84	88,36	92,52	90,74	
	Cakupan Desa yang melaksanakan siskudes kategori optimal			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan penanggulangan bencana			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah rumah tangga miskin			587	522	456	391	326	587	522	329	-	-	
	Persentase Ketercapaian Target PBB			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,20	100%	100%	
	Perencanaan kinerja 2022-2023													
II	Indikator Kinerja Kunci (PP-6/2008)													
A	Aspek Pelayanan Umum													
1	Fokus Layanan Urusan Wajib : Otonomi Daerah													
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat		Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
II	Indikator Kinerja Lainnya													
A	Indikator Kinerja Program RPJMD 2018-2023													
1	Non Urusan													

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12	13
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					27,23	29,04	30,86	-	-	70,678	-	-	
	SAKIP Perangkat Daerah					BB	A	A	-	-	BB	A	A	
2	Urusan													
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					86,40	89	90	-	-	88,36	92,52	90,74	
	Persentase Desa dengan Nilai SAKIP Desa minimal Berkategori Baik					60%	80%	100%	-	-	-	70,63	-	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisa ANALISA
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 20233	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pencapaian Kinerja Tahun 2024-2026											
I	Indikator Kinerja Sasaran											
A	Indikator Kinerja Program Renstra 2024-2026											
1	Non Urusan											
	Zona Integritas			75	80	82	85	-	-	-	-	
2	Urusan											
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			90,00	90,50	90,58	90,99	90,74	-	-	-	

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Conggeang

Kecamatan Conggeang merupakan salah satu Kecamatan yang terlewati oleh pembangunan Jalan Tol Cisumdawu diantaranya Desa Cibeureuyeuh, Desa Conggeang Kulon, Desa Conggeang wetan, Desa Cacaban, Desa Cipamekar, Desa Karanglayung dan Desa Babakan Asem. Kecamatan Conggeang memiliki begitu banyak potensi wilayah diantaranya Kawasan hutan dan area persawahan yang luas yang akan berubah menjadi Kawasan jalan tol dan lahan perumahan Dengan dilaluinya oleh jalan tol tersebut maka merubah struktur tata ruang dan wilayah di Kecamatan Conggeang karena yang tadinya lahan pesawahan, perkebunan dan pemukiman kini beralih fungsi menjadi jalan tol. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan perekonomian atau matapencaharian penduduk Conggeang yang terkena imbas atas proyek tersebut karena lahan yang biasanya mereka garap kini belalih fungsi. dan juga ada beberapa Desa yang beralih lahan yang tadinya perkebunan beralih fungsi menjadi Perum / perumahan diantaranya Desa Cimapekar dan Desa Cibeureuyeuh. Di desa Cipamekar lahan seluas 750 m² yang asalnya perkebunan warga sekarang beralih pungsi menjadi perumahan oleh PT Rahayu Putra Eks dengan nama perumahannya yaitu Grand Park Cipamekar. Sedangkan di Desa Cibeureuyeuh yang merupakan daerah perbukitan Sebagian wilayahnya dijadikan lahan untuk tempat pemukiman warga yang terkena dampak jalan tol yang disediakan oleh Desa setempat dan Sebagian lagi merupakan lahan pribadi warga yang dijadikan perumahan dan ditambah dengan adanya Bendungan Cipanas yang baru-baru ini telah disyah kan oleh wakil presiden Republik Indonesia pada Selasa Tanggal 09 Juli yang Dimana dalam proyek tersebut ada beberapa Desa di Wilayah Kecamatan Conggeang yang terkena dampak dari pembuatan bendungan Cipanas tersebut diantaranya Desa Ungkal, Desa Cibubuan dan Desa Karanglayung yang Dimana yang tadinya digunakan sebagai lahan persawahan dan Perkebunan kini beralih fungsi menjadi sebuah bendungan. Sehingga merubah struktur tata ruang di wilayah dikecamatan Conggeang.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, Indeks Repormasi Birokrasi Perangkat Daerah, Sakip Perangkat Daerah kajian hasil evaluasi pelaksanaan serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Conggeang, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Conggeang. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Kecamatan Conggeang cukup baik terlihat dari capaian indikator terealisasi semuanya.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja Kecamatan Conggeang diantaranya Belum Optimalnya tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE), Birokrasi yang belum efektif dan efisien, Efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur masih rendah, Masih rendahnya profesionalisme ASN, Masih rendahnya masyarakat yang diberikan layanan, Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan, Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat, Prevelensi Stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero stunting, Daya saing pemberdayaan perempuan yang belum optimal, Masih rendahnya penyelesaian gangguan ketertiban umum, Belum optimalnya penanganan permasalahan/pengaduan konflik sosial, Masih rendahnya nilai SAKIP Desa yang berkategori baik, Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, akan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap pencapaian visi kabupaten dan visi nasional yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat, penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal, dan perwujudan sumber daya aparatur yang handal.
4. Peluang dalam meningkatkan pelayanan di Kecamatan Conggeang, secara keseluruhan peluang yang dimiliki oleh Kecamatan adalah situasi kecamatan yang kondusif, koordinasi yang cukup baik antara kecamatan dengan Kepala Desa dan unsur Forkopimcam, sehingga kesemuanya dapat mendukung program kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun Tantangan yang harus dihadapi diantaranya Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas dan Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Conggeang harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - a. Mewujudkan ketersediaan data / informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan.
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 pada Kecamatan Conggeang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Program/Kegiatan yang tertera dalam Rancangan Awal RKPD yang datanya diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.

Analisis kebutuhan didapat setelah Kecamatan Conggeang melalui seksi masing-masing mengevaluasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan mendesak untuk segera ditangani pada tahun anggaran 2025.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 setelah kami bandingkan dengan analisis kebutuhan yang dirasakan perlu segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kecamatan Conggeang				4,121,466,149.00	Kecamatan Conggeang				5,919,578,637.00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Conggeang	Sakip Perangkat Daerah	A Kategori	3,481,678,649.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Conggeang	Sakip Perangkat Daerah	A Kategori	4,816,728,637.00	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	72,809,000.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	103,311,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	14,245,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	34,245,000.00	Alasan Penambahan pagu dikarenakan banyaknya beban kerja yang ditanggung seperti dalam hal pembuatan Dokumen Renja 2026 Pembuatan Dokumen Renja Perubahan 2025, Penyusunan Musrenbang dan Penyusunan Profil Kecamatan
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,108,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9,108,000.00	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6,138,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.180.000,00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,839,000.00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3,839,000.00	
7	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,939,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4,939,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	34,540,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	45.000.000,00	Alasan Penambahan pagu dikarenakan banyaknya beban kerja yang ditanggung dan target yang harus dicapai seperti dalam hal pembuatan LKIP Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan, Laporan LKPJ, Laporan SAKIP, Laporan ZI, Laporan Manajemen Risiko, Laporan SKM Per Triwulan dan Laporan Sievka Pertriwulan sehingga membutuhkan anggaran yang cukup untuk pemenuhan kegiatan tersebut

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 laporan	2,486,903,404.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	2,495,725,404.00	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Conggeang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2,472,625,404,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 laporan	2,472,625,404.00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	4,092,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	8.100.000,00	Alasan Penambahan Pagu dikarenakan penyusunan Laporan SPM dan SPJ harus diserahkan ke kabupaten setiap bulan sehingga membutuhkan anggaran lebih

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	12 laporan	10,186,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Akhir Tahun SKPD	12 laporan	15.000.000,00	Alasan penambahan pagu dikarenakan banyaknya laporan-laporan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan tersebut sehingga membutuhkan anggaran lebih
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada	1 Dokumen	31,861,335.00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada	1 Dokumen	38,705,335.00	
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 dokumen	4,400,000.00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik	1 dokumen	4,400,000.00	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 laporan	13,200,000.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 laporan	20.044.000,00	Alasan penambahan pagu dikarenakan banyaknya laporan-laporan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan tersebut sehingga membutuhkan anggaran lebih

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	14,261,335.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	14,261,335.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	8,148,140.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 laporan	60,000,000.00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	8,148,140.00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	60.000.000	Alasan Penambahan pagu dikarenakan adanya peraturan baru yang Dimana setiap instansi harus memiliki pakian yang berbeda-beda setiap harinya
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 laporan	78,141,569.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 laporan	207,161,870.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	14,779,699.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000,00	Dikarenakan banyaknya kebutuhan barang pakai habis yang dibutuhkan oleh Kecamatan Conggeang

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	7,543,360.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	7,543,360.00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13,200,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	20.000.000,00	Dikarenakan banyaknya biaya tak terduga dalam hal jamuan Makanan yang di akibatkan oleh adanya kegiatan jamuan tamu yang tak terduga
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6,556,110.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Conggeang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	6,556,110.00	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan"	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3,062,400.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan"	Kecamatan Conggeang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	3,062,400.00	
5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	33,000,000.00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Conggeang	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	150.000.000	Alasan penambahan pagu adalah untuk pasilitas yang dibutuhkan dalam mini command center

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Conggeang	"Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	4 laporan	256,640,173.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Conggeang	"Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"	4 laporan	1,025,000,000.00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Conggeang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	134,553,241,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Conggeang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 unit	600,000,000.00	Dikarenakan kendaraan dinas baik itu roda 2 maupun roda 4 membutuhkan perawatan yang lebih baik lagi sehingga ada beberapa kendaraan yang sudah tidak berfungsi lagi
	Pengadaan Mebel	Kec.Conggeang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	28,963,000.00	Pengadaan Mebel	Kec.Conggeang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	75.000.000.00	Dikarenakan kurangnya pasilitas kantor dan pasilitas yang ada kurang memadai

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiat anm	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	38,123,932.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	150.000.000,00	Alasan Penambahan pagu dikarenakan banyaknya laptop, komputer, printer dll yang sudah tidak layak pakai sehingga membutuhkan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang baru agar dapat menunjang pelayanan yang optimal
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	55,000,000.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	200.000.000,00	Sarana dan prasarana yang sudah tidak kondusif dan membutuhkan perawatan yang lebih baik lagi agar dapat menciptakan kenyamanan dalam pelayanan publik
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	303,800,028.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan	381,825,028.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	1 laporan	31,825,028,00	"Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	1 laporan	31,825,028,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	271,975,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	350.000.000,00	Alasan Penambahan pagu dikarenakan untuk Pembelian Honorarium jasa tenaga operator, pengemudi, jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga pelayanan umum, jasa keamanan , jasa supir dan honor taklim aparaturnya
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Conggeang	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	4 laporan	243,375,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Conggeang	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah"	4 laporan	675,000,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Conggeang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	72,380,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Conggeang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	85.000.000.00	Dikarenakan banyaknya kendaraan dinas yang harus dipenuhi dalam hal pemeliharaan, pembayaran pajak STNK serta Pembayaran BBM kendaraan tersebut
	Pemeliharaan Mebel	Kec.Conggeang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	4,400,000.00	Pemeliharaan Mebel	Kec.Conggeang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	20,000,000.00	Dikarenakan banyaknya barang yang ruksak sehingga perlu untuk diperbaiki
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	5,148,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	20,000,000.00	Dikarenakan banyaknya barang yang ruksak sehingga perlu untuk diperbaiki
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	106,447,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	350,000,000.00	Alasan Penambahan pagu dikarenakan banyaknya bangunan yang bocor dikala musim hujan tiba sehingga perlu pembenahan atau pemeliharaan Gedung kantor

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	55,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Conggeang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	200.000.000,00	Sarana dan prasarana Gedung kantor di Kecamatan Conggeang banyak yang rapuh sehingga perlunya pemeliharaan kembali agar sarana prasarana Gedung kantor dapat tertata dengan baik
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Conggeang	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	100%	121,000,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Conggeang	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	100%	145,750,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	2 laporan	60,500,000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	2 laporan	60,500,000.00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	30,250,000.00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	30,250,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	30,250,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	30,250,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan	1 laporan	30,250,000.00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	55,000,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	30,250,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan	1 laporan	55.000.000,00	Untuk kegiatan Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) agar target dapat tercapai maka perlu adanya motifasi ketiaptiap desa agar semangat dalam pemungutan PBB sehingga perlu ada nya pemberian hadiah kepada desa yang tergapnya tercapai

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 laporan	30,250,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 laporan	30,250,000.00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	30,250,000.00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	30,250,000.00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Conggeang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	62.50	462,885,500.00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Conggeang	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	62.50	572,100,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Congg eang	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1 laporan	12,100,000.00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Congg eang	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	1 laporan	12,100,000.00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Congg eang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	12,100,000.00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Congg eang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	12,100,000.00	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Congg eang	Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 laporan	450,785,500.00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Congg eang	Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 laporan	560,000,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Conggeang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	426,585,500.00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Conggeang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	500.000.000,00	Dikarenakan banyaknya aktifitas kegiatan yang membutuhkan massa yang banyak seperti kegiatan PHBN, MTQ dan PKK sehingga memerlukan anggaran lebih
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Conggeang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	12,100,000.00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Conggeang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	30.000.000,00	Dikarenakan banyaknya aktifitas yang harus dibina dan diberikan pelatihan dalam kegiatan tersebut seperti pembinaan kader posyandu, pembinaan karangtaruna, pembinaan LPM sehingga membutuhkan anggaran lebih

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	12,100,000.00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	30.000.000,00	Dikarenakan banyaknya aktifitas yang harus dibina dan diberikan pelatihan dalam kegiatan tersebut seperti Pembinaan BUMDES, BBGRM dan Pengembangan produk usaha mikro kecil sehingga membutuhkan anggaran lebih
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Conggeang	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100%	7,502,000.00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Conggeang	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100%	20,000,000.00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	7,502,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 laporan	20,000,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	7,502,000.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	20,000,000.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Conggeang	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	18,150,000.00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Conggeang	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100%	38,250,000.00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 laporan	18,150,000.00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 laporan	30,000,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kec.Conggeang	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lembaga Masyarakat	9,075,000.00	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Kec.Conggeang	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lembaga Masyarakat	0	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9,075,000.00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	30,000,000.00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Conggeang	Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik	25.00 persen	30,250,000.00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Conggeang	Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik	25.00 persen	165,000,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	4 laporan	30,250,000.00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	4 laporan	165,000,000.00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5,500,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	35,000,000.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	5,500,000.00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	35,000,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	4,400,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	20,000,000.00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	4,400,000.00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	30,000,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	5,500,000.00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Conggeang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	15,000,000.00	

No	RANCANGAN AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Keterangan	
	Usulan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiat anm	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Congg eang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	4,950,000.00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec.Congg eang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	30,000,000.00		
JUMLAH					4,121,466,149.00	JUMLAH					5,919,578,637.00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Conggeang merupakan hasil dari musrenbang tingkat Desa yang merupakan podium musyawarah perencanaan tahunan di tingkat Desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil masyarakat di tingkat Desa. Hasil dari musrenbang Desa akan di usulkan di tingkat Kecamatan, tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang Desa yaitu untuk mendorong partisipasi masyarakat Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan ditingkat Desa tujuannya adalah;

1. Menyepakati prioritas usulan program dan kegiatan yang termasuk upaya pembangunan yang menjadi wewenang Desa bahan penyusunan rencana kerja SKPD Desa.
2. Priorotas program dan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh warga Desa yang dibiayai melalui dana DD, ADD, Saprasi, DBH Pajak, DBH Retribusi Daerah dan swadaya masyarakat dikoordinasikan oleh lembaga desa.
3. Priorotas program dan kegiatan pembangunan Desa yang akan diusulkan melalui musrenbang Kecamatan untuk menjadi bahan kegiatan pemerintah Daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.
4. Menyepakati tim delegasi Desa yang akan memaparkan usulan yang ada di desanya di forum musrenbang kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Tahun 2025 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas Kecamatan Conggeang maupun pengakomodasian program/kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat melalui Musrenbang Dusun maupun Musrenbang Desa di Kecamatan Conggeang dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Usulan masyarakat dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Conggeang pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2024, yang terakomodir sebagai bagian dari usulan rencana program kegiatan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 selengkapnya tercantum dalam Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4.
Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Desa/Kelurahan Berdasarkan
Kriteria dan Menurut Urusan Perangkat Daerah
Kecamatan Conggeang

Urutan Prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Status Usulan (PIK/PI PD)	Kriteria PIK (1 – 4)	Prioritas Pembangunan Daerah (1-4)	Perangkat Daerah
	Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)			499.000.000,-				
1.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Conggeang Kulon	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
2.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Padaasih	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
3.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Babakan Asem	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
4.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Narimbang	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
5.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Karanglayung	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
6.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Cibeureuyeh	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
7.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak	Desa Ungkal	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK

Urutan Prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Status Usulan (PIK/PI PD)	Kriteria PIK (1 – 4)	Prioritas Pembangunan Daerah (1-4)	Perangkat Daerah
	Sampah, Container Bak Truk Sampah)					infrastruktur wilayah yang berkualitas		
8.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Cipamekar	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
9.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Cacaban	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
10.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Jambu	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
11.	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Conggeang Wetan	1 Unit	45.363.636,36	PIK	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
	Pagu Indikatif Perangkat Daerah (PIPD)							
1.	Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Desa Padaasih	500 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur.	PUTR
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Desa Babakan Asem	500 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Rehabilitasi Jalan Kabupaten/Strategis	Desa Babakan Asem	700 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas	PUTR
4	Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)	Desa Conggeang Wetan	1 Unit	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan Nilai Tambah sektor Pertanian, Perikanan dan Peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5	Pengadaan,Pe	Desa	5 Titik	-	PI Sektoral	Ketahanan dan	Optimalisasi	Dinas

Urutan Prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Status Usulan (PIK/PI PD)	Kriteria PIK (1 – 4)	Prioritas Pembangunan Daerah (1-4)	Perangkat Daerah
	masangan dan Pemeliharaan PJU	Cibubuan				pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Penataan Ruang	Perhubungan
6	Pengadaan Sarana Pengumpul Sampah (Motor Sampah, Gerobak Sampah, Container Bak Truk Sampah)	Desa Cibubuan	2 unit	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
7	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Jambu	400 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
8	Pengadaan Prasarana Persampahan (Bangunan Tempat Penampungan Sementara Sampah/TPS, Tempat Pengolahan Sampah 3R/TPS3R)	Desa Narimbang	1 Titik	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Karanglayung	500M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Cibeureuyeuh	365 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
11	Rehabilitasi Jalan Kabupaten/Strategis	Desa Ungkal	1.000 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas	PUTR
12	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Conggeang Kulon	250 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
13	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa	Desa Conggeang Wetan	1.250 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Urutan Prioritas	Usulan Kegiatan	Lokasi	Volume	Usulan Anggaran (Rp)	Status Usulan (PIK/PI PD)	Kriteria PIK (1 – 4)	Prioritas Pembangunan Daerah (1-4)	Perangkat Daerah
14	Rehabilitasi Jalan Kabupaten/Strategis	Desa Cipamekar	1.500 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Pemerataan Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur wilayah dan Konektivitas	PUTR
15	Pengadaan Prasarana Persampahan (Bangunan Tempat Penampungan Sementara Sampah/TPS, Tempat Pengolahan Sampah 3R/TPS3R)	Desa Cacaban	1 Unit	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan pengelolaan persampahan	DLHK
16	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Conggeang Wetan	1.250 M	-	PI Sektoral	Ketahanan dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan ditunjang infrastruktur wilayah yang berkualitas	Peningkatan intensitas pemeliharaan infrastruktur	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Adapun penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Conggeang yaitu:

1. DLHK

Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Kehutanan. Kepala Bidang Kehutanan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Kehutanan. Uraian Tugas Kepala Bidang Kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Bidang Kehutanan;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Kehutanan;
- c. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya;
- d. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan Taman Hutan Raya;
- e. menyelenggarakan kebijakan teknis kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan Taman Hutan Raya;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Taman Hutan Raya;
- g. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar di kawasan Taman Hutan Raya;

- h. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan Taman Hutan Raya kabupaten;
- i. menyelenggarakan kebijakan penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran Taman Hutan Raya;
- j. menyelenggarakan kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Hutan Raya;
- k. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem Taman Hutan Raya;
- l. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Taman Hutan Raya;
- m. merumuskan kebijakan terkait rencana penerimaan pendapatan asli daerah dalam pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan Taman Hutan Raya;
- n. menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Taman Hutan Raya;
- o. menyelenggarakan kebijakan teknis penyediaan, penataan, pemeliharaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau skala kabupaten;
- p. menyelenggarakan kebijakan teknis penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- q. menyelenggarakan kebijakan teknis penataan dan pengelolaan ruang taman kota serta keindahan tata rias kota;
- r. menyelenggarakan kebijakan fasilitasi pengelolaan taman lingkungan pada skala kabupaten;
- s. menyelenggarakan kebijakan teknis penataan taman alun-alun kabupaten dan kecamatan sebagai ruang terbuka hijau;
- t. menyelenggarakan kebijakan teknis penataan pemakaman sebagai ruang terbuka hijau;
- u. menyelenggarakan sosialisasi, koordinasi dan kerjasama penataan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat;
- v. menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan pohon di areal hijau;
- w. menyelenggarakan perumusan kebutuhan pengadaan pohon dan sarana pendukung pemeliharaan jalur hijau;
- x. menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian penanganan ruang terbuka hijau skala kabupaten;
- y. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya;
- z. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;
- aa. menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Hutan Raya;
- bb. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Taman Hutan Raya dan ruang terbuka hijau;
- cc. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Kehutanan; dan melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya;

2. DINAS PUTR

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang. Adapun Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Dinas PUTR diantaranya :

- a. Merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan dibidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- c. Mengendalikan kegiatan berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Merumuskan bahan kebijakan Daerah di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang Sumber Daya Air, bidang bina marga, bidang Tata Ruang, bidang bina konstruksi, dan bidang cipta karya;
- g. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian program pengelolaan bidang Sumber Daya Air, bidang bina marga, bidang Tata Ruang, bidang bina konstruksi, dan bidang cipta karya;
- h. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan urusan bidang Sumber Daya Air, bidang bina marga, bidang Tata Ruang, bidang bina konstruksi, dan bidang cipta karya;
- i. Mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

3. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. Uraian Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan program, ketatausahaan, penganggaran, rumah tangga, keuangan, kepegawaian dan aset dinas;
- b. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan dan pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian serta mengawasi pelaksanaan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan Pertanian;
- c. menetapkan kebijakan sentra komoditas Pertanian, sasaran areal tanam dan luas baku lahan Pertanian serta mengawasi pelaksanaan penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan Pertanian serta pemetaan potensi lahan serta pengaturan dan penerapan kawasan terpadu;
- d. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya di tingkat usaha tani dan desa;
- e. mengawasi pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi, pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi, pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan Petani pemakai air serta perkumpulan Petani pemakai air tanah, bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi serta penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- f. mengawasi pelaksanaan bimbingan penggunaan, penyaluran Pupuk dan Pestisida, dan mengawasi pelaksanaan pengawasan pengadaaan, peredaran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida;
- g. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan, peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan serta mengawasi bimbingan penerapan standar mutu Pupuk dan Pestisida;
- h. mengawasi pelaksanaan kebijakan, identifikasi kebutuhan, pengembangan, penerapan standar mutu, pembinaan dan pengembangan jasa, analisis teknis sosial ekonomi, bimbingan penggunaan dan pemeliharaan serta pembinaan dan pengembangan bengkel alat dan mesin Pertanian;

- i. menetapkan kebijakan pengaturan penggunaan benih, sentra produksi benih dan izin produksi benih;

4. DINAS PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Dinas Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- a. mengendalikan kegiatan berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian dinas;
- b. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Dinas Perhubungan;
- c. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder kabupaten, jaringan trayek angkutan kota dan/atau angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan, jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan;
- d. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin);
- e. menetapkan kebijakan teknis tentang manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah Kabupaten;
- f. menetapkan kebijakan teknis tentang kegiatan dalam rangka pengaturan dan penentuan jaringan lintas angkutan penumpang umum dalam trayek di wilayah Kabupaten;
- g. menetapkan kebijakan teknis tentang kegiatan pembangunan pengelolaan dan pengembangan jaringan lalu lintas;
- h. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan rekomendasi analisis dampak lalu lintas (andalalin) di dalam dan di luar ruang lalu lintas serta akses jalan keluar masuk kendaraan;
- i. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- j. menetapkan kebijakan teknis tentang penerangan jalan umum (PJU), Penerangan Jalan Lingkungan (P JL), Lampu Hight Mass (LHM) dan ruang terbuka;
- k. menentukan kebijakan teknis tentang penentuan lokasi pemasangan penerangan jalan umum;

- l. menetapkan kebijakan teknis tentang pengaturan waktu operasional PJU, PJL dan LHM;
- m. menetapkan kebijakan teknis tentang koordinasi teknis dengan instansi terkait PJU, PJL, dan LHM;
- n. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana PJU PJL, dan LHM;
- o. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan inventarisasi, pengkajian kebutuhan, pemasangan/atau pendirian dan pembongkaran sarana dan psarana PJU, PJL dan LHM;
- p. menetapkan kebijakan teknis tentang pengaturan waktu operasional PJU, PJL dan LHM termasuk instalasi kelistrikan;
- q. menetapkan kebijakan teknis tentang penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang PJU, PJL, dan LHM;
- r. menetapkan kebijakan teknis tentang rencana dan program kerja manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- s. menetapkan kebijakan teknis tentang penentuan titik simpul terminal;
- t. menetapkan kebijakan teknis tentang rencana lokasi kebutuhan sarana dan prasarana lalu lintas di jalan kabupaten;
- u. menetapkan kebijakan teknis tentang pendataan, analisa dan pengaturan arus lalu lintas kendaraan melalui teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- v. menetapkan kebijakan teknis penetapan lokasiterminal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- w. menetapkan kebijakan teknis tentang penentuan lokasi terminal barang dan desain terminal barang;
- x. menetapkan kebijakan teknis tentang rencana penetapan lokasi dan pemasangan fasilitas lalu lintas;
- y. menentapkan kebijakan teknis tentang kebutuhan dan alokasi penyelenggaraan angkutan bermotor dan angkutan umum tidak bermotor;
- z. menetapkan kebijakan teknis tentang pembinaan pengemudi kendaraan angkutan umum bermotor, angkutan umum tidak bermotor dan awak angkutan danau/sungai serta para pengguna jasa angkutan;
- aa. menetapkan kebijakan teknis tentang usulan penetapan tarif angkutan umum, membina dan mengendalikan implementasi kebijakan teknis tentang pelaksanaan tarif angkutan umum;

- bb. menetapkan kebijakan teknis tentang rancang bangun terminal angkutan barang dan terminal penumpang Tipe C;
- cc. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan terminal;
- dd. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan;
 - 1. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek yang sepenuhnya berada di wilayah kabupaten;
 - 2. rekomendasi izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP);
 - 3. rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek;
 - 4. izin insidental keluar lintas trayek yang telah ditetapkan dalam keputusan izin trayek angkutan;
 - 5. rekomendasi izin usaha angkutan umum;
 - 6. rekomendasi izin trayek angkutan penumpang umum lintas batas kabupaten/kota;
 - 7. rekomendasi penerbitan surat tanda nomor kendaraan angkutan umum;
 - 8. rekomendasi daftar ulang izin trayek angkutan penumpang umum;
 - 9. penerbitan kartu pengawasan angkutan penumpang umum;
- ee. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan dan pelayanan angkutan penumpang umum dalam trayek yang berada di wilayah Kabupaten;
- ff. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;
- gg. menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan sepeda motor;
- hh. menetapkan kebijakan teknis tentang penyelenggaraan angkutan orang dan barang tidak bermotor;
- ii. menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan barang di kabupaten;
- jj. menetapkan kebijakan teknis tentang pelaksanaan :
 - 1. izin dan/atau rekomendasi dispensasi penggunaan jalan bagi pengangkutan barang pada jalan-jalan tertentu;
 - 2. izin dan/atau rekomendasi dispensasi bongkar muat barang;
 - 3. izin dan/atau rekomendasi pangkalan bongkar muat angkutan barang.
- kk. menetapkan kebijakan teknis tentang pengendalian bongkar muat barang yang meliputi peninjauan lokasi bongkar muat barang, pengaturan waktu bongkar muat barang;

- ll. menetapkan kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan;
- mm. menetapkan kebijakan teknis tentang patroli lalu lintas dan angkutan jalan;
- nn. menetapkan kebijakan teknis tentang pemeriksaan dan penyidikan dokumen perizinan dan dokumen angkutan umum;
- oo. menetapkan kebijakan teknis tentang pengamanan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta hari-hari besar agama, nasional/daerah lainnya yang akan berdampak pada terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan;
- pp. menetapkan kebijakan teknis tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas guna keselamatan dan kelancaran kegiatan para pejabat penyelenggara pemerintahan daerah;
- qq. menetapkan kebijakan teknis tentang penimbangan berjalan pada kendaraan bermotor di jalan kabupaten, jalan provinsi dan nasional yang ada di dalam wilayah kabupaten;
- rr. menetapkan kebijakan teknis tentang pemberian bantuan pengaturan lalu lintas kepada anggota masyarakat pemegang izin penggunaan jalan di luar kepentingan lalu lintas;
- ss. menetapkan kebijakan teknis tentang bantuan penanganan kecelakaan lalu lintas dan bencana alam di jalan;
- tt. menetapkan kebijakan teknis tentang penderekan kendaraan yang berhenti/parkir di lokasi terlarang dan/atau mengganggu kelancaran lalu lintas;
- uu. menetapkan kebijakan teknis tentang pelayanan pengamanan dan pengaturan terhadap pengguna jalan pada titik-titik ruas jalan yang rawan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- vv. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas dan sinergitas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas;
- ww. menetapkan kebijakan teknis tentang efektifitas Forum Lalu Lintas mengenai urusan pemerintahan di bidang :
 - 1. Jalan;
 - 2. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3. Pengembangan industri lalu lintas dan pengembangan jalan;
 - 4. Pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 5. Penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

- xx. menetapkan kebijakan teknis tentang eksistensi PPNS LLAJ;
- yy. menetapkan kebijakan teknis tentang monitoring, pembinaan, pengawasan dan pengendalian parkir umum yang diselenggarakan dinas yang berada di taman parkir gedung parkir, tempat rekreasi dan di luar badan/tepi jalan lainnya;
- zz. menetapkan kebijakan teknis tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi pemegang izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum oleh swasta baik perusahaan maupun perorangan yang berada di taman parkir, gedung parkir, tempat rekreasi dan di luar badan/tepi jalan lainnya;

5. DINAS PERKIMTAN

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Uraian Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang Perumahan dan prasarana, sarana, utilitas umum, bidang Kawasan Permukiman, dan bidang pertanahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi kebijakan di bidang Perumahan dan prasarana, sarana, utilitas umum, bidang Kawasan Permukiman, dan bidang pertanahan;
- f. menyelenggarakan dan mengendalikan fasilitasi pembangunan serta pelaksanaan program pengembangan Perumahan berdasarkan kebijakan Daerah Kabupaten;
- g. memimpin dan menyelenggarakan pelayanan pemanfaatan dan pengendalian sarana prasarana Permukiman;
- h. memimpin dan menyelenggarakan kebijakan pemanfaatan dan pendataan Kawasan Permukiman;

- i. memimpin dan menyelenggarakan program dan kegiatan perencanaan kebutuhan pertanahan, pendataan pertanahan, dan pelayanan administrasi pertanahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten atau untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- j. memimpin dan menyelenggarakan kebijakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan prasana, sarana, dan utilitas umum berdasarkan peraturan perundang undangan;
- k. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan; dan
- m.** melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2026

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2025 telah mempedomani kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun program dalam renja Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yang mendukung prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada tabel Tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3.1

Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang Tahun 2025

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA BARAT	PRIORITAS KABUPATEN SUMEDANG	PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Inovasi pelayanan public dan penataan Daerah	Penguatan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan untuk Mewujudkan Birokrasi yang Dinamis, Efektif, Efisien dan Berdampak	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Kertertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Conggeang Tahun 2025

1.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Untuk merealisasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 – 2026 yaitu menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab dalam melayani masyarakat, penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai terangkum dalam tujuan dan tujuan harus menggambarkan arah strategis dan perbaikan yang ingin di ciptakan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Conggeang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

3.2.2. Sasaran

Sasaran Kecamatan Conggeang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan harus bersifat spesifik, terukur dan dapat diukur. Adapun sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Conggeang. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini :

Adapun Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Conggeang Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan Kabupaten	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal	Target kinerja sasaran pada tahun			Kondisi akhir	Keterangan	
						2024	2025	2026		Formulasi	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks pelayanan publik	-	-	Poin	4,70	4,71	4,72	4,75	4,75		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Indeks kepuasan masyarakat Kecamatan	Poin	9.00	90,50	90,58	90,99	90,99	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur dibagi Total Unsur yang Terisi dikali Nilai Penimbang (Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017)	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dirilis oleh Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	LPPD Kabupaten	-	-	Skori	3,65	3,76	3,78	3,80	3,80		
		Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Poin	75	80	82	85	85	Total dari Nilai Komponen Pengungkit (Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik) ((Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)	Laporan penilaian Indeks Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat

3.3. Program Kegiatan Kecamatan Conggeang tahun 2025

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Conggeang adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. **Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan**

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Conggeang diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Sumedang. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Conggeang merupakan implementasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah yang didasari Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 yaitu Sehati (Sejahtera, agamis dan demokratis)

- Pencapaian MDGs

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya.

Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan,

meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Conggeang diimplementasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sumedang. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Conggeang. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2021 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Conggeang diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- **Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah**

Kecamatan Conggeang sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Sumedang. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata alam terutama culture heritage.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Conggeang melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

2. **Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.**

- **Jumlah Program, Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Conggeang Tahun 2025 adalah 6 Program dengan 16 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan

- Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Conggeang sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Conggeang dan melingkupi semua Desa.
- Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.
Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Conggeang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
KECAMATAN CONGGEANG TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN CONGGEANG						5.403.842.915,0 0							5.940.322.450,0 0	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						5.403.842.915,0 0							5.940.322.450,0 0	
	7.01	KECAMATAN						5.403.842.915,0 0							5.940.322.450,0 0	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			-	3.903.342.915,0 0						-	4.204.822.450,0 0	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DAERAH KABUPATEN/KOTA														
	7.01.01.2 .01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18laporan			6 laporan	270.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk m	Aparatur Kecamatan	6laporan	355.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaa	17 Dokumen			6 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang	DANA TRANSFER UMUM-	-	Inovasi Pelayanan Publik dan	Aparatur Kecamatan	6 Dokumen	150.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			n Perangkat Daerah						, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL		Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berdampak				
	7.01.01.2 .01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												i yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalis	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												asi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang	DANA TRANSFER UMUM-	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataa	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL		n Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	207 Laporan			12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan	Aparatur Kecamatan	69 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berdampak				
	7.01.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12laporan			3 laporan	2.481.778.450,0			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien	Aparatur Kecamatan	3laporan	2.506.778.450,0	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan berdam pak				
	7.01.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan				17 Orang/bulan	2.441.778.450,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan	Aparatur Kecamatan	16 Orang/bulan	2.441.778.450,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen			12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan	Aparatur Kecamatan	12 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	36 Laporan			12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata	Aparatur Kecamatan	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPD									kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9laporan			3 laporan	34.044.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalis	Aparatur Kecamatan	3laporan	36.044.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												asi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen			2 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan	36 Laporan			12 Laporan	20.044.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan	Aparatur Kecamatan	12 Laporan	20.044.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan	36 Laporan			12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Sumedang,	DANA TRANSFER	-	Inovasi Pelayan	Aparatur Kecamatan	12 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Conggeang , Semua Kel/Desa	UMUM-DANA BAGI HASIL		an Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis , efektif, efisien dan berdampak				CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3laporan			1 laporan	20.030.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan	Aparatur Kecamatan	1laporan	35.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berdampak				
	7.01.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket			1 Paket	20.030.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis	Aparatur Kecamatan	2 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24laporan			6 laporan	77.980.765,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang	Aparatur Kecamatan	6laporan	92.000.000,00	KECAMATAN CONGGELANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dinamis , efektif, efisien dan berdam- pak				
	7.01.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap- an Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	17.326.765,00	Kab. Sumedang, Conggeang , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayan- an Publik dan Penataa- n Daerah. Penguat- an digitalis- asi tata kelola pemerin- tah an untuk m- ewujud	Aparatur Kecamatan	1 Paket	18.000.000,00	KECAMAT- AN CONGGE- ANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemer	Aparatur Kecamatan	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ntah an untuk m ewujud kan birokras i yang dinamis , efektif, efisien dan berdam pak				
	7.01.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	30.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah. Penguat an digitalis	Aparatur Kecamatan	1 Paket	30.000.000,00	KECAMAT AN CONGGE ANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												asi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	17.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.	Aparatur Kecamatan	1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	20 Dokumen			5 Dokumen	3.654.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan	Aparatur Kecamatan	5 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Perundang-Undangan yang Disediakan									Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan	Aparatur Kecamatan	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berdampak				
	7.01.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16laporan			4 laporan	225.784.700,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien	Aparatur Kecamatan	4laporan	240.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan berdam pak				
	7.01.01.2 .07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Sumedang, Conggeang , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang	Aparatur Kecamatan	6 Unit	0,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dinamis , efektif, efisien dan berdam pak				
	7.01.01.2 .07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit			30 Unit	137.830.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan	Aparatur Kecamatan	3 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	34 Unit			6 Unit	87.954.700,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemer	Aparatur Kecamatan	10 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ntah an untuk m ewujud kan birokras i yang dinamis , efektif, efisien dan berdam pak				
	7.01.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	0,00	Kab. Sumedang, Conggeang , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayan an Publik dan Penataa n Daerah. Penguat an digitalis	Aparatur Kecamatan	1 Unit	0,00	KECAMAT AN CONGGE ANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												asi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8laporan			2 laporan	428.085.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan	Aparatur Kecamatan	2laporan	550.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	6 Laporan			12 Laporan	45.210.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan	Aparatur Kecamatan	2 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Listrik yang Disediakan									Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	36 Laporan			12 Laporan	382.875.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang	DANA TRANSFER UMUM-	-	Inovasi Pelayanan Publik	Aparatur Kecamatan	12 Laporan	500.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL		dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Pemeliharaan	15laporan			5 laporan	365.640.000,00			-	Inovasi Pelayanan	Aparatur Kecamatan	5laporan	390.000.000,00	KECAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Urusan Pemerintahan Daerah	n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdamak				CONGGONG
	7.01.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit			11 Unit	100.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan	Aparatur Kecamatan	13 Unit	110.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2 .09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit			3 Unit	0,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis	Aparatur Kecamatan	3 Unit	0,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												, efektif, efisien dan berdam- pak				
	7.01.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 Unit			6 Unit	15.640.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayan- an Publik dan Penataa- n Daerah. Penguat- an digitalis- asi tata kelola pemerin- tah an untuk m- ewujud- kan	Aparatur Kecamatan	11 Unit	20.000.000,00	KECAMAT- AN CONGGE- ANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan	Aparatur Kecamatan	1 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata	Aparatur Kecamatan	1 Unit	60.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	-	-	-	-	680.500.000,00				-	-	-	710.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	7laporan			2 laporan	50.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataa	Masyarakat	2laporan	70.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan									n Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.02.2 .01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/S	36 Laporan			12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang	DANA TRANSFER UMUM-	-	Inovasi Pelayanan	Masyarakat	12 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			inergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL		Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdamak				CONGGONG
	7.01.02.2 .01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan	Masyarakat	1 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN CONGGANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berdampak				
	7.01.02.2 .02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh unit Kerja Perangkat daerah Yang ada di Kecamatan	4laporan			1 laporan	70.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien	Masyarakat	1laporan	80.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dan berdam pak				
	7.01.02.2 .02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang	Masyarakat	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	4laporan			1 laporan	560.500.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi	Masyarakat	1laporan	560.500.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												i yang dinamis, efektif, efisien dan berdam-pak				
	7.01.02.2 .04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk m	Masyarakat	1 Dokumen	0,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.02.2 .04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	560.500.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola	Masyarakat		560.500.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	-			-	465.000.000,00						-	520.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	4laporan			1 laporan	25.000.000,00		-	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan	Masyarakat	1laporan	30.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.03.2 .01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarak	48 Lembaga			4 Lembaga K	25.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang	DANA TRANSFER UMUM-	-	Inovasi Pelayanan	Masyarakat	16 Lembaga	30.000.000,00	KECAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			atan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kemasyarakatan			emasyarakatan		, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL		Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif,		Kemasyarakatan		CONGGES

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												efisien dan berdampak				
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12laporan			3 laporan	440.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi	Masyarakat	3laporan	490.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												i yang dinamis, efektif, efisien dan berdam pak				
	7.01.03.2 .03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	48 Lembaga Kemasyarakatan			4 Lembaga Kemasyarakatan	275.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk m	Masyarakat	16 Lembaga Kemasyarakatan	300.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.03.2 .03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	48 Lembaga Kemasyarakatan			4 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola	Masyarakat	16 Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.03.2 .03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan			1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan	Masyarakat	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	-			-	95.000.000,00						-	100.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Koordinasi	4laporan			1 laporan	95.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan	Masyarakat	1laporan	100.000.000,00	KECAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdamak				CONGGONG
	7.01.04.2 .01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36 Laporan			12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan	Masyarakat	12 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berdampak				
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	-			-	40.000.000,00						-	60.000.000,00	
	7.01.05.2 .01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4laporan			1 laporan	40.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk m	Masyarakat	1laporan	60.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												ewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.05.2 .01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola	Masyarakat	1 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik	-			-	220.000.000,00						-	345.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi	18laporan			6 laporan	220.000.000,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataa	Masyarakat	6laporan	345.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa									n Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.06.2 .01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang	3 Dokumen			1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang	DANA TRANSFER UMUM-	-	Inovasi Pelayanan	Masyarakat	1 Dokumen	130.000.000,00	KECAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL		Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdamak				CONGGONG
	7.01.06.2 .01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan	Masyarakat	1 Dokumen	65.000.000,00	KECAMATAN CONGGONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berdampak				
	7.01.06.2 .01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis	Masyarakat	1 Dokumen	40.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												, efektif, efisien dan berdam- pak				
	7.01.06.2 .01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan	Masyarakat	1 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.06.2 .01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan	Masyarakat	1 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
	7.01.06.2 .01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Sumedang, Conggeang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Penguatan digitalisasi tata	Masyarakat	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN CONGGEANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												kelola pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, efektif, efisien dan berdampak				
JUMLAH								5.403.842.915,00							5.940.322.450,00	

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Program prioritas Renja masing-masing Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Conggeang pada Tahun 2025 sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Conggeang Tahun 2025-2026 terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Daerah Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang Tahun 2025 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran pagu Rp. 270.000.000.00
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran pagu Rp 130,000,000.00
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd dengan anggaran pagu Rp. 10,000,000.00
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd dengan anggaran pagu Rp. 10,000,000.00
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran pagu Rp. 10,000,000.00
 - Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD dengan anggaran pagu Rp. 10,000,000.00
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dengan anggaran pagu Rp. 100,000,000.00
2. Administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran pagu Rp. 2,481,778,450.00
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran pagu Rp. 2,441,778,450.00
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp. 20,000,000.00
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran skpd dengan anggaran pagu Rp. 20,000,000.00
3. Administrasi Barang Milik Daerah dengan anggaran pagu Rp. 34.044.000,00
 - Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dengan anggaran pagu Rp. 6.000.000,00
 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Rp. 20.044.000,00
 - Penatausahaan barang milik daerah SKPD dengan anggaran pagu Rp. 8.000.000,00

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran pagu Rp. 20.030.000,00
 - Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran pagu Rp 20.030.000,00
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran pagu Rp 77.980.765,00
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran pagu Rp. 17.326.765,00
 - Penyediaan peralatan rumah tangga dengan anggaran pagu Rp 10.000.000,00
 - Penyediaan bahan logistik kantor dengan anggaran pagu Rp 30.000.000,00
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran pagu Rp 17.000.000,00
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran pagu Rp 3.654.000,00
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran pagu Rp. 225.784.700,00
 - Pengadaan Mebel dengan anggaran pagu Rp. 137.830.000,00
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran pagu Rp. 87.954.700,00
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran pagu Rp. 428.085.000,00
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran pagu Rp. 45.210.000,00
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran pagu Rp. 382.875.000,00
8. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran pagu Rp. 365.640.000,00
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran pagu Rp. 100.000.000,00
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran pagu Rp. 15.640.000,00
 - Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran pagu Rp 200.000.000,00
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran pagu Rp. 50.000.000,00

2. Program Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 50.000.000,00
 - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan anggaran pagu Rp. 25.000.000,00
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 25.000.000,00

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 70.000.000,00
 - Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 70.000.000,00
 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dengan anggaran pagu Rp 560.500.000,00
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran pagu Rp 560.500.000,00
- 3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
1. Koordinasi kegiatan pemerdayaan desa dengan anggaran pagu Rp. 25.000.000,00
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran pagu Rp. 25.000.000,00
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran pagu Rp. 25.000.000,00
 2. Pemerdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 440.000.000,00
 - Penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dengan anggaran pagu Rp. 275.000.000,00
 - Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dengan anggaran pagu Rp. 90.000.000,00
 - Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan anggaran pagu Rp. 75.000.000,00
- 4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**
1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran pagu Rp. 95.000.000,00
 - Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 95.000.000,00
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**
1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan anggaran pagu Rp. 40.000.000,00
 - Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan anggaran pagu Rp. 40.000.000,00
- 6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa**
1. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa dengan anggaran pagu Rp. 220.000.000,00
 - Fasilitasi, administrasi tata pemerintahan desa dengan anggaran pagu Rp. 80.000.000,00
 - Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa dengan anggaran pagu Rp. 60.000.000,00

- Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa dengan anggaran pagu Rp 30,000,000.00
- Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan anggaran pagu Rp. 50.000.000,00

Rencana kerja perangkat dan pendanaan Kecamatan Conggeang Tahun 2025 dituangkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN CONGGEANG KAB. SUMEDANGTAHUN 2024

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Kategori	Kec. Conggeang	3,903,342,915.00	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	Kec. Conggeang	270,000,000.00	
01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Kec. Conggeang	130,000,000.00	
Aktivitas	Renstra				50,000,000.00	Fixed Cost
	Renja Murni				10,000,000.00	
	Renja Perubahan				10,000,000.00	
	Musrenbang				50,000,000.00	
	Profil				10,000,000.00	
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kec. Conggeang	10,000,000.00	
Aktivitas	Penyusunan RKA SKPD					
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	Kec. Conggeang	10,000,000.00	
Aktivitas	Penyusunan Perubahan RKA SKPD					

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
7 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kec. Conggeang	10,000,000.00	
Aktivitas	Penyusunan DPA SKPD					
7 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kec. Conggeang	10,000,000.00	
Aktivitas	Penyusunan Perubahan DPA SKPD					
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kec. Conggeang	100,000,000.00	
Aktivitas	Roadshow SAKIP				50,000,000.00	Fixed Cost
	LKIP				10,000,000.00	
	LKPJ				5,000,000.00	
	SKM				5,000,000.00	
	SPIP				10,000,000.00	
	Laporan Dalbang				5,000,000.00	
	RB ZI				5,000,000.00	
	Laporan Capaian Kinerja (SAKIP)				5,000,000.00	
	SIEVKA				5,000,000.00	
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	Kec. Conggeang	2,481,778,450.00	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	Kec. Conggeang	2,441,778,450.00	
Aktivitas	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
7 01 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kec. Conggeang	20,000,000.00	
Aktivitas	Penatausahaan (Verifikasi Pengajuan Pencairan dan SPJ)					
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	12 laporan	Kec. Conggeang	20,000,000.00	
Aktivitas	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD/Akhir Tahun SKPD					
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	Kec. Conggeang	34,044,000.00	
7 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 dokumen	Kec. Conggeang	6,000,000.00	
Aktivitas	Penyusunan RKBMD, RKPBM					
7 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	12 laporan	Kec. Conggeang	20,044,000.00	
Aktivitas	Verifikasi data pembukaan BMD, Percocokan kode barang dan kode rekening verifikasi neraca aset dan neraca akuntansi					
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	Kec. Conggeang	8,000,000.00	
Aktivitas	Pembukuan BMD, Inventarisasi BMD, Pelaporan BMD					
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	Kec. Conggeang	20,030,000.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kec. Conggeang	20,030,000.00	
Aktivitas	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan, Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dan Sejenisnya					
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	Kec. Conggeang	77,980,765.00	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Kec. Conggeang	17,326,765.00	
Aktivitas	Barang-Barang Habis Pakai dan Tidak Perlu Pemeliharaan (ATK, Materai, Alat-alat Listrik, dan sejenisnya)					
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Kec. Conggeang	10,000,000.00	
Aktivitas	Penyediaan peralatan rumah tangga (Thermogun, handsanitizer, sabun cuci tangan, desinfektan, masker, Tissue, Wastafel Fortable, Faceshield, peralatan kebersihan, dan sejenisnya)					
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Kec. Conggeang	30,000,000.00	
Aktivitas	Penyediaan Mamin, Air Galon, Makanan Khas, dan sejenisnya					
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Kec. Conggeang	17,000,000.00	
Aktivitas	Penyediaan Cetak dan penggandaan (Cetak Buku, Cetak					

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
	Photo, ID Card, Photocpy, dan sejenisnya)					
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan"	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	Kec. Conggeang	3,654,000.00	
Aktivitas	Pembelian surat kabar, buku, dan sejenisnya					
7 01 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Kec. Conggeang	-	
Aktivitas	Dukungan Happy Digital Region (Mini Command Center, dan sejenisnya)				-	
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Kec. Conggeang	225,784,700.00	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	Kec. Conggeang		
Aktivitas	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Roda 2 dan 4 Untuk Ess II s.d Staf				-	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	Kec. Conggeang	137,830,000.00	
Aktivitas	Pengadaan Mebel (Meja, Kursi, Lemari, dan Sejenisnya)					
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	Kec. Conggeang	87,954,700.00	
Aktivitas	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer PC Laptop, Printer)					
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	Kec. Conggeang	0.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
Aktivitas	Pembangunan Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT Kantor, Ruang Rapat, Partisi, Toilet, Penataan Halaman, dan sejenisnya					
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100persen	Kec. Conggeang	428,085,000.00	
7 01 01 2.08 02	"Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik"	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Kec. Conggeang	45,210,000.00	
Aktivitas	Pembayaran langganan air, telpon, listrik, internet					
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Kec. Conggeang	382,875,000.00	
Aktivitas	Operator SIPD				36,000,000.00	
	Operator Simpeg				18,000,000.00	
	Operator Simedok				18,000,000.00	
	Operator Sijagur				18,000,000.00	
	Operator Pajak				18,000,000.00	
	Taklim Aparatur				12,000,000.00	
	Tenaga Kebersihan				36,000,000.00	
	Jasa Keamanan Kantor				136,875,000.00	
	Petugas Pelayanan				72,000,000.00	
	Tenaga Supir				18,000,000.00	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	Kec. Conggeang	365,640,000.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 unit	Kec. Conggeang	100,000,000.00	
Aktivitas	Operasional bensin				60,000,000.00	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, pembayaran STNK (Kendaraan Roda 2 dan 4 untuk Ess 2 s.d Staf)				40,000,000.00	
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 unit	Kec. Conggeang	0.00	
Aktivitas	Jasa service perbaikan kursi, meja, lemari dan sejenisnya					
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 unit	Kec. Conggeang	15,640,000.00	
Aktivitas	Jasa Service Komputer, Laptop, Printer, AC, Drone, Kamera dan sejenisnya					
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Kec. Conggeang	200,000,000.00	Fixed Cost
Aktivitas	Rehab Gedung Kantor, Jasa Pemeliharaan Rumah Jabatan, Rumah Dinas, Gedung Kantor, dan sejenisnya					
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Kec. Conggeang	50,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
Aktivitas	Jasa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Mushola, Garasi, Gazebo, Kolam, Pagar Kantor, TPT, Ruang Rapat, Partisi, Toilet, dan sejenisnya) / Pengecetan gedung kantor					
Pilihan						
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat yang diberikan layanan	100Persen	Kec. Conggeang	680,500,000.00	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 persen	Kec. Conggeang	50,000,000.00	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 Laporan	Kec. Conggeang	25,000,000.00	
Aktivitas	Rapat Koordinasi pemerintahan/ Rapat Minggon					
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kec. Conggeang	25,000,000.00	
Aktivitas	Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tingkat Kecamatan					
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100 Persen	Kec. Conggeang	70,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Kec. Conggeang	70,000,000.00	
Aktivitas	Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)				35,000,000.00	
	Pelayanan Administrasi Pertanahan (PPAT)				20,000,000.00	
	Pelayanan Administrasi (kependudukan dll)				15,000,000.00	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan	100 Persen	Kec. Conggeang	560,500,000.00	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kec. Conggeang	0.00	
Aktivitas	Pelayanan Publik Perizinan (rekomendasi teknis) yang dilimpahkan kepada Camat					
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	Kec. Conggeang	560,500,000.00	
Aktivitas	Urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat				-	
	Rantang kasih				328,500,000	Fixed Cost/Strategis
	Operasional Rantang Kasih				12,000,000	Fixed Cost/Strategis
	Geber Miskin				120,000,000	Fixed Cost/Strategis

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
	Penanganan Bencana				100,000,000	Fixed Cost/Strategis
	Rembuk Misting				-	Fixed Cost/Strategis
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	83.33 Persen	Kec. Conggeang	465,000,000.00	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	Kec. Conggeang	25,000,000.00	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	Kec. Conggeang	25,000,000.00	
Aktivitas	Penyelenggaraan Musrenbang Desa				25,000,000.00	
7 01 03 2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	100 Persen	Kec. Conggeang	440,000,000.00	
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	4 Lembaga	Kec. Conggeang	275,000,000.00	
Aktivitas	Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an				35,000,000.00	
	Peringatan Hari-Hari Besar				150,000,000.00	
	Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Langsung Masyarakat (Blm)				-	
	Pemberdayaan Keluarga				70,000,000.00	
	Rantang Kasih				0.00	
	Operasional Rantang Simpati				0.00	
	Geber Misting				0.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
	Rembuk Misting				20,000,000.00	
7 01 03 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4 Lembaga	Kec. Conggeang	90,000,000.00	
Aktivitas	Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)				30,000,000.00	
	Pembinaan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah				30,000,000.00	
	Pembinaan Kepemudaan Dan Olahraga				30,000,000.00	
	Pembinaan LPM				-	
7 01 03 2.03 04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 laporan	Kec. Conggeang	75,000,000.00	
Aktivitas	Pengembangan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah				30,000,000.00	
	Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (Bbgrm)				10,000,000.00	
	Pembinaan Bumdes				35,000,000.00	
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Jumlah Gangguan Ketertiban Umum yang diselesaikan	100Persen	Kec. Conggeang	95,000,000.00	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	Kec. Conggeang	95,000,000.00	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Kec. Conggeang	95,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
Aktivitas	Pembinaan dan fasilitasi Linmas				35,000,000.00	
	fasilitasi Kebencanaan (koordinasi kejadian bencana, fasilitasi satlak bencana)				30,000,000.00	
	Monitoring pengendalian gangguan kamtibmas				30,000,000.00	
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Permasalahan/ pengaduan/ konflik sosial yang ditangani	100Persen	Kec. Conggeang	40,000,000.00	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100 Persen	Kec. Conggeang	40,000,000.00	
7 01 05 2.01.06	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lembaga Masyarakat	Kec. Conggeang	-	
Aktivitas	Monitoring Pemilihan Umum					
7 01 05 2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Kec. Conggeang	40,000,000.00	
Aktivitas	Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan					
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dengan nilai SAKIP Desa minimal berkategori baik	66.67 persen	Kec. Conggeang	220,000,000.00	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6 laporan	Kec. Conggeang	220,000,000.00	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Kec. Conggeang	80,000,000.00	

Kode	Bidang Urusan/Program/Kegiatan/sub kegiatan/Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Lokasi	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting APBD Kab (Khusus untuk Aktivitas Sub Kegiatan)
Aktivitas	Pembinaan Administrasi/aparatur Pemerintahan Desa				30,000,000.00	
	Penyelenggaraan Lomba Desa				50,000,000.00	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Kec. Conggeang	60,000,000.00	
Aktivitas	Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa				30,000,000.00	
	Monitoring Dan Evaluasi Rapbdes Dan Rpapbdes				30,000,000.00	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Kec. Conggeang	-	
Aktivitas	Fasilitasi/Monitoring Pilkades				-	
7 01 06 2.01 09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	Kec. Conggeang	30,000,000.00	
Aktivitas	Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa					
7 01 06 2.01 12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan Kewajiban Lembaga Keamasyarakatan	1 Dokumen	Kec. Conggeang	-	
Aktivitas	Pembinaan RT/RW					
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	Kec. Conggeang	50,000,000.00	
Aktivitas	Pembinaan dan Evaluasi SAKIP Desa dan pemberian hadiah					
JUMLAH					5,403,842,915.00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2025 Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang merupakan tolak ukur/pedoman serta bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan sektor pemerintahan yang diharapkan mampu mengantisipasi dan memecahkan masalah-masalah yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut.

Metode penyusunan rencana kinerja tahunan dilakukan secara partisipatif dibawah tanggung jawab Camat, Kasubag program dan keuangan. Aspirasi dari pihak eksternal, *stakeholder*, diakomodir dalam rencana kinerja tahunan ini melalui kegiatan interaktif pada saat pembahasan Rencana Strategis Pembangunan Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Rencana kinerja tahunan ini dapat terwujud apabila semua aparat Kecamatan mempunyai komitmen dan konsisten tinggi untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut, sehingga diharapkan rencana kinerja tahun 2025 ini dapat mencapai visi dan misi yang diemban dan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Conggeang Tahun 2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Kecamatan Conggeang berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2025 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, dimana Renja Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Conggeang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025, sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Kecamatan Conggeang wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2025. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian rencana kerja Kecamatan Conggeang tahun 2025 disusun, diharapkan mudah-mudahan mampu melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna. Namun Rencana Kerja Kecamatan Conggeang tahun 2025 sudah mencakup semua program/ kegiatan pemerintahan baik pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif dan berupaya maksimal dalam penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Conggeang Tahun 2025. Semoga dapat terlaksana sesuai dengan sasaran target dan capaian yang telah ditentukan.

Conggeang, Juli 2024
CAMAT CONGGEANG



IRFAN SETIADI S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19660803 198603 1 005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2025

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan	✓			
2.	Pengolahan data dan informasi.	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan.	✓			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah tahun lalu	✓			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi	✓			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD	✓			
7	Perumusan tujuan dan sasaran.	✓			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	✓			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	✓			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah	✓			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan	✓			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan	✓			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran	✓			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing	✓			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja,	✓			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi	✓			

13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat	✓			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025	✓			



Sumedang, Juli 2024
Camat Conggeang

TATANG SETIADI, S.Sos
NIP. 19680803 198603 1 005